



Katalog BPS : 9302003.3502

PDRB

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO *KABUPATEN PONOROGO* MENURUT LAPANGAN USAHA 2009 - 2013



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PONOROGO**



Katalog BPS: 9302003.3502

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PONOROGO
MENURUT LAPANGAN USAHA**

TAHUN 2009-2013

<http://ponorogobps.go.id>
<http://ponorogokab.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PONOROGO**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PONOROGO
MENURUT LAPANGAN USAHA
TAHUN 2009 - 2013**

No. Publikasi <i>Publication Number</i>	: 35020.1402
Katalog BPS	: 9302003.3502
Ukuran Buku <i>Book Size</i>	: 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman <i>Number of Pages</i>	: xviii + 110 Halaman <i>Pages</i>
Naskah <i>Manuscript</i>	: BPS Kabupaten Ponorogo <i>BPS – Statistics of Ponorogo Regency</i>
Penyunting <i>Editor</i>	: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik <i>District Balance and Statistical Analysis Section</i>
Gambar Kulit <i>Cover Design</i>	: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik <i>District Balance and Statistical Analysis Section</i>
Diterbitkan oleh <i>Published By</i>	: BPS Kabupaten Ponorogo <i>BPS – Statistics of Ponorogo Regency</i>

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya
May be cited with reference to the source

KATA PENGANTAR

Ass. Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ponorogo Menurut Lapangan Usaha tahun 2009-2013 yang merupakan kelanjutan dari publikasi tahun sebelumnya.

Dari penyusunan data PDRB ini akan diperoleh gambaran umum mengenai struktur perekonomian, pertumbuhan ekonomi, pendapatan regional dan pendapatan rata-rata (*income per kapita*) penduduk Kabupaten Ponorogo. Dengan mencermati lebih lanjut data tersebut akan diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang akan membantu Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan perekonomian sehingga menjadi lebih terarah.

Mengingat pentingnya data PDRB ini, BPS Kabupaten Ponorogo berusaha menjaga akurasi, validitas, dan penyempurnaan penyajian secara terus-menerus. Harapan kami semoga data PDRB ini bisa bermanfaat bagi pengguna data secara luas, tidak hanya terbatas untuk Pemerintah Kabupaten Ponorogo, tetapi juga bermanfaat bagi para pengusaha, akademisi dan pengguna data lainnya.

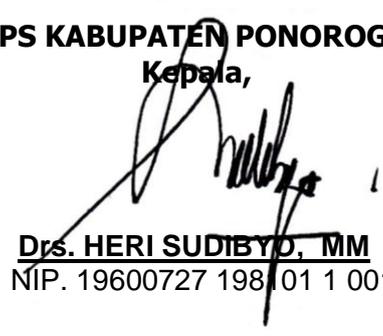
Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan guna perbaikan penyusunan PDRB selanjutnya. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini.

Wass. Wr. Wb.

Ponorogo, Juli 2014

BPS KABUPATEN PONOROGO

Kepala,



Drs. HERI SUDIBYO, MM
NIP. 19600727 198101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
RINGKASAN	xv
I. PENDAHULUAN	3
1.1 LATAR BELAKANG	3
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.3 MANFAAT	6
1.4 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6
1.5 KEGUNAAN ANGKA PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8
II. KONSEP DAN DEFINISI	13
2.1 UMUM	13
2.1.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA PASAR	13
2.1.2 PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETO ATAS DASAR HARGA PASAR	13
2.1.3 PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETO ATAS DASAR BIAYA FAKTOR	14

2.3.3.4 PERUBAHAN STOK	29
2.3.3.5 EKSPOR NETO	29
2.4 PENYAJIAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN	30
2.4.1 REVALUASI	31
2.4.2 EKSTRAPOLASI	32
2.4.3 DEFLASI	33
2.4.3.1 DEFLASI GANDA	34
2.4.3.2 EKSTRAPOLASI LANGSUNG TERHADAP NILAI TAMBAH	35
2.4.3.3 DEFLASI LANGSUNG TERHADAP NILAI TAMBAH	35
2.4.3.4 DEFLASI KOMPONEN PENDAPATAN	36
2.5 REBASING TAHUN DASAR (2000 = 100)	36
2.6 NILAI TAMBAH BRUTO, CARA PENYAJIAN, DAN ANGKA INDEKS	38
III. URAIAN SEKTORAL	45
3.1 SEKTOR PERTANIAN	45
3.1.1 TANAMAN BAHAN MAKANAN	45
3.1.2 TANAMAN PERKEBUNAN	46
3.1.3 PETERNAKAN	47
3.1.4 KEHUTANAN	48
3.1.5 PERIKANAN	48
3.2 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	49
3.3 SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN	49

3.8.3	JASA PENUNJANG KEUANGAN	57
3.8.4	SEWA BANGUNAN	57
3.8.5	JASA PERUSAHAAN	57
3.9	SEKTOR JASA-JASA	58
3.9.1	JASA PEMERINTAHAN UMUM	58
3.9.2	JASA SOSIAL KEMASYARAKATAN	59
3.9.2.1	JASA PENDIDIKAN	59
3.9.2.2	JASA KESEHATAN	60
3.9.2.3	JASA SOSIAL KEMASYARAKATAN LAINNYA	60
3.9.3	JASA HIBURAN DAN KEBUDAYAAN	61
3.9.4	JASA PERORANGAN DAN RUMAHTANGGA	61
IV.	TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN PONOROGO	65
4.1	GAMBARAN UMUM	67
4.2	STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN PONOROGO	71
4.3	PERTUMBUHAN EKONOMI	73
4.4	ANGKA – ANGKA SEKTORAL	76
4.4.1	SEKTOR PERTANIAN	76
4.4.2	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	78
4.4.3	SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN	79
4.4.4	SEKTOR LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH	81
4.4.5	SEKTOR BANGUNAN	82
4.4.6	SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL, DAN RESTORAN	83

DAFTAR ISI

4.4.7 SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	85
4.4.8 SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN .	86
4.4.9 SEKTOR JASA – JASA	89
4.5 PDRB PER KAPITA DAN PENDAPATAN REGIONAL PER KAPITA	90
4.6 TINGKAT PERKEMBANGAN HARGA	92
4.7 PERBANDINGAN PDRB JAWA TIMUR DAN PDRB KABUPATEN/KOTA	94
LAMPIRAN TABEL POKOK & TABEL TURUNAN PDRB 2009-2013	99

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	CONTOH PENGHITUNGAN METODE REVALUASI	32
Tabel 2.2	CONTOH PENGHITUNGAN METODE EKSTRAPOLASI	33
Tabel 2.3	CONTOH PENGHITUNGAN METODE DEFLASI	34
Tabel 4.1	STRUKTUR EKONOMI KAB. PONOROGO TH 2009 – 2013	72
Tabel 4.2	PERTUMBUHAN EKONOMI KAB. PONOROGO TH 2009-2013	75
Tabel 4.3	PDRB SEKTOR PERTANIAN ADHB TAHUN 2013	76
Tabel 4.4	PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN ADHB TAHUN 2013	79
Tabel 4.5	PDRB SEKTOR LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH ADHB TAHUN 2013	81
Tabel 4.6	PDRB SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL, DAN RESTORAN ADHB TAHUN 2013	83
Tabel 4.7	PDRB SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI ADHB TAHUN 2013	85
Tabel 4.8	PDRB SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN ADHB TAHUN 2013	87
Tabel 4.9	PDRB SEKTOR JASA – JASA ADHB TAHUN 2013	89
Tabel 4.10	PERBANDINGAN PDRB DI SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN (SWP) MADIUN DAN SEKITARNYA TAHUN 2013.....	95

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1.	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN PONOROGO MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2009 – 2013	99
Tabel 2.	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN PONOROGO MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2009 – 2013	100
Tabel 3.	PERANAN EKONOMI SEKTORAL PDRB KABUPATEN PONOROGO ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2009 – 2013	101
Tabel 4.	PERANAN EKONOMI SEKTORAL PDRB KABUPATEN PONOROGO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2009 – 2013	102
Tabel 5.	INDEKS PERKEMBANGAN SEKTORAL PDRB KABUPATEN PONOROGO ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2009 – 2013	103
Tabel 6.	INDEKS PERKEMBANGAN SEKTORAL PDRB KABUPATEN PONOROGO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2009 – 2013	104
Tabel 7.	INDEKS BERANTAI SEKTORAL PDRB KABUPATEN PONOROGO ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2009 – 2013	105
Tabel 8.	INDEKS BERANTAI SEKTORAL PDRB KABUPATEN PONOROGO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2009– 2013	106
Tabel 9.	INDEKS IMPLISIT SEKTORAL PDRB KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2009 – 2013	107
Tabel 10.	PERTUMBUHAN INDEKS IMPLISIT PDRB TAHUN 2009 – 2013	108
Tabel 11.	PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2009 – 2013	109
Tabel 12.	SUSUNAN AGREGAT PDRB DAN PENDAPATAN REGIONAL KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2009 – 2013	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KAB. PONOROGO TAHUN 2009 – 2013	68
Gambar 4.2	STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2013	71
Gambar 4.3	PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT SEKTOR TH. 2009-2013	74
Gambar 4.4	PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2013	77
Gambar 4.5	PDRB SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN ADHB TAHUN 2009 - 2013	78
Gambar 4.6	PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TAHUN 2013	80
Gambar 4.7	PERTUMBUHAN SEKTOR KONSTRUKSI TAHUN 2009 - 2013	82
Gambar 4.8	PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL, DAN RESTORAN TAHUN 2013	84
Gambar 4.9	PERTUMBUHAN SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI TAHUN 2013	86
Gambar 4.10	PERTUMBUHAN SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN TAHUN 2013	88
Gambar 4.11	PDRB SEKTOR JASA – JASA TAHUN 2013	90
Gambar 4.12	PERTUMBUHAN PDRB PER KAPITA KABUPATEN PONOROGO DAN INFLASI KOTA MADIUN TAHUN 2009 – 2013 (%)	92
Gambar 4.13	LAJU IMPLISIT PDRB TH. 2009-2013	93
Gambar 4.14	KONTRIBUSI PDRB PER SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN (SWP) TERHADAP PDRB JAWA TIMUR TAHUN 2013	94

RINGKASAN

- ✚ Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha tahun 2009-2013 ini menggunakan metode pendekatan produksi yaitu jumlah nilai barang dan jasa akhir atau nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh suatu unit ekonomi/unit usaha di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Sementara tahun dasar yang dipakai adalah tahun 2000, artinya untuk memperoleh pertumbuhan riil PDRB, variabel harga didasarkan pada harga-harga pada tahun 2000.
- ✚ PDRB 2009-2013 ini dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu :
 1. Pertanian
 2. Pertambangan dan Penggalian
 3. Industri Pengolahan
 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih
 5. Konstruksi/Bangunan
 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
 7. Pengangkutan dan Komunikasi
 8. Jasa Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
 9. Jasa-jasa
- ✚ PDRB disajikan dalam dua bentuk, yaitu *atas dasar harga berlaku (adhb)* dan *atas dasar harga konstan (adhk)*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 1. Pada penyajian atas dasar harga yang berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah, yang berarti bahwa perkembangan PDRB dipengaruhi oleh produksi dan harga pada tahun yang bersangkutan.
 2. Pada penyajian atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar (tahun 2000), sehingga perkembangan PDRB semata-mata disebabkan oleh perkembangan riil kuantum produksi bukan lagi karena faktor fluktuasi harga.

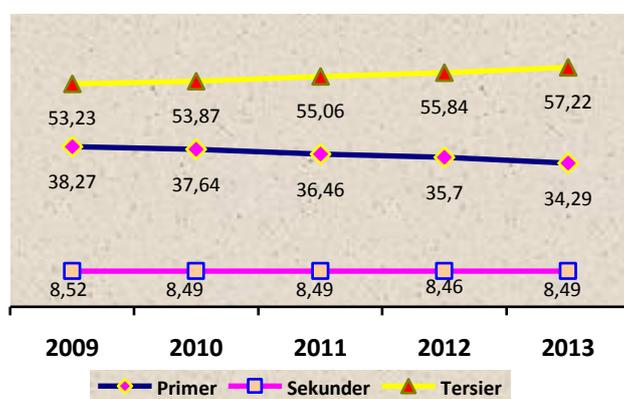
PDRB adhb mengalami perkembangan 1,7 kali lipat selama kurun waktu lima tahun terakhir, dari Rp. 6,432 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp. 10,692 triliun pada tahun 2013. Sementara PDRB adhk mengalami perkembangan 1,3 kali lipat dalam waktu lima tahun terakhir, yaitu 3,149 triliun pada tahun 2009 meningkat menjadi 3,982 triliun pada tahun 2013.

PDRB Kabupaten Ponorogo
Tahun 2009-2013

TAHUN	ADHB (000.000 Rp.)	ADHK (000.000 Rp.)
2009	6.432.277,70	3.148.981,71
2010	7.449.685,32	3.331.058,41
2011	8.404.945,13	3.537.868,11
2012	9.486.200,08	3.768.417,45
2013	10.692.392,15	3.982.180,05

Struktur ekonomi Kabupaten Ponorogo didominasi oleh sektor primer dan sektor tersier. Dalam perkembangannya, peranan sektor tersier semakin meningkat seiring dengan kejenuhan peranan yang terjadi pada sektor primer. Selama lima tahun terakhir, sektor primer menunjukkan kecenderungan semakin menurun, yaitu dari 38,27 persen pada tahun 2009 menurun menjadi 34,29 pada tahun 2013. Kecenderungan yang sama juga dialami sektor sekunder yang menurun dari 8,52 persen pada tahun 2009 menjadi 8,49 persen di tahun 2013. Sebaliknya peranan sektor tersier lima tahun terakhir semakin meningkat yaitu dari 53,23 persen pada tahun 2009 menjadi 57,22 persen pada tahun 2013.

Struktur Ekonomi Kabupaten Ponorogo
Tahun 2009-2013 (%)



Sektor Primer :

- Pertanian
- Pertambangan & Penggalian

Sektor Sekunder :

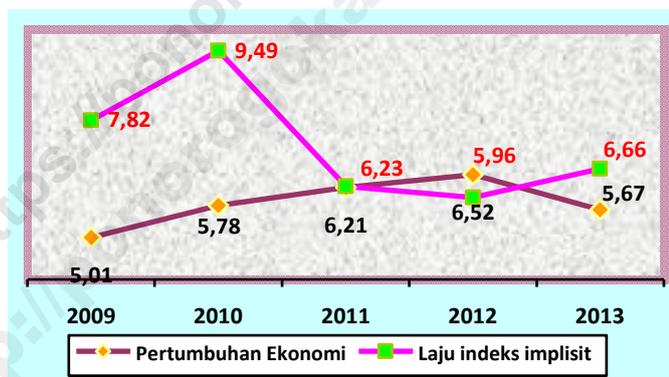
- Industri Pengolahan
- Listrik, Gas & Air Bersih
- Bangunan

Sektor Tersier :

- Perdagangan, Hotel & Restoran
- Angkutan & Komunikasi
- Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
- Jasa-jasa

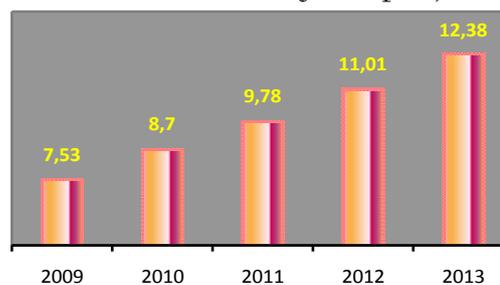
- ✚ Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif. Selama tahun 2009 hingga 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo tumbuh dari 5,01 persen menjadi 6,52 persen. Namun pada tahun 2013 perekonomian Kabupaten Ponorogo melambat pada angka 5,67 persen. Pengaruh menurunnya produksi sektor pertanian khususnya pada subsektor tanaman bahan makanan merupakan faktor utama penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013. Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan di Kabupaten Ponorogo sehingga bila terjadi fluktuasi akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Secara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi per tahun dalam kurun waktu 2009-2013 adalah 5,84 persen. Sementara inflasi menurut Indeks Implisit PDRB pada tahun 2013 sebesar 6,66 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,96 persen. Inflasi menurut Indeks Implisit PDRB ini menggambarkan perubahan harga yang dilihat dari sisi produsen.

Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Indeks Implisit
Kabupaten Ponorogo Tahun 2009-2013 (%)



- ✚ PDRB perkapita Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nilai PDRB perkapita pada tahun 2013 sebesar Rp. 12,5 juta rupiah per tahun, meningkat 66,23 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. PDRB perkapita ini tidak bisa menggambarkan secara riil pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk namun masih cukup relevan untuk mengetahui secara rata-rata peningkatan pendapatan masyarakat.

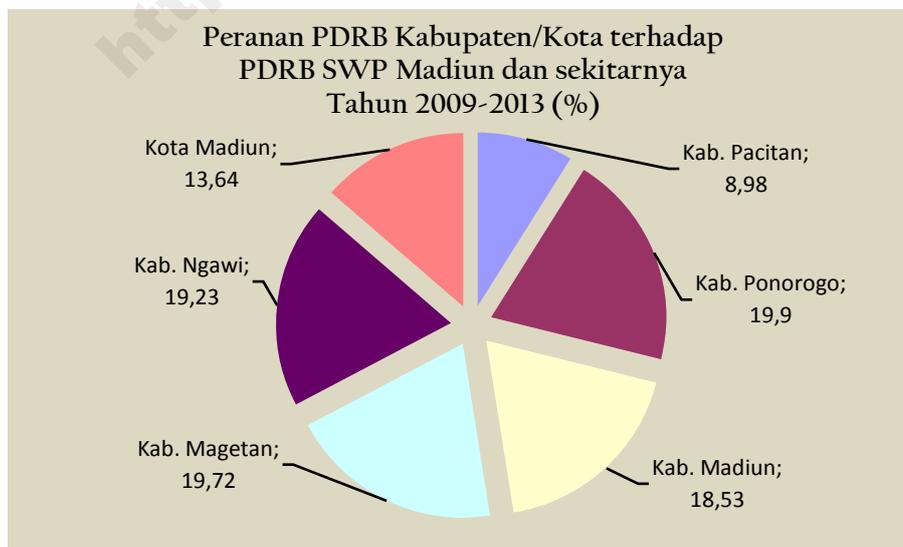
PDRB Perkapita menurut ADHB
Tahun 2009-2013 (juta rupiah)



- Bila dibandingkan dengan total PDRB Jawa Timur yang mencapai Rp. 1.136.326.868,44 juta pada tahun 2013, PDRB di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Madiun dan sekitarnya menyumbang peranan yang relatif kecil yaitu 4.73 persen. Jauh lebih rendah dibanding kontribusi yang diberikan oleh Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Gerbangkertosusila Plus yang mencapai 55,22 persen dan menempati urutan pertama dalam menyumbang perekonomian di Jawa Timur.
- Meski mempunyai nominal PDRB yang terbesar di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Madiun dan sekitarnya namun dari sisi pertumbuhan PDRB Kabupaten Ponorogo tahun 2013 sebesar 5,67 persen berada di bawah pertumbuhan kabupaten/kota lainnya. Bahkan masih di bawah rata-rata pertumbuhan SWP Madiun dan sekitarnya yang mencapai 6,63 persen.

Perbandingan PDRB Di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP)
Madiun dan sekitarnya
Tahun 2013

Kabupaten/Kota	ADHB (000.000 Rp.)	Pertumbuhan (%)
Kab. Pacitan	4.826.394,86	6,02
Kab. Ponorogo	10.692.392,15	5,67
Kab. Madiun	9.953.785,63	6,37
Kab. Magetan	10.598.186,96	6,67
Kab. Ngawi	10.331.392,62	6,98
Kota Madiun	7.327.602,22	8,07
SWP Madiun dan sekitarnya	53.729.754,43	6,63



A large, faint watermark logo is centered on the page. It consists of a circular arrangement of small grey squares forming a ring. Overlaid on this ring is the text 'BPS KABUPATEN MOROGOGO' in a sans-serif font. A URL, 'http://bporoskab.bps.go.id', is written diagonally across the watermark.

I

PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Secara umum tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, menjaga kestabilan harga, mengatasi masalah pengangguran, menjaga keseimbangan neraca pembayaran, dan pendistribusian pendapatan yang lebih adil dan merata. Melalui tujuan pembangunan ini diharapkan akan terjadi peningkatan kemakmuran masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah di Indonesia diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi ekonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pembangunan yang berhasil adalah yang menghasilkan dampak positif yang besar dan dampak negatif yang minimal. Adapun dampak positif pembangunan ekonomi antara lain adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menghadapi situasi tersebut pemerintah Kabupaten Ponorogo menempuh sejumlah kebijakan untuk memantapkan landasan ekonomi daerah yang mandiri dijiwai nilai-nilai religius berbasis pertanian yang tangguh yang mengarah pada

agrobisnis dan agroindustri untuk mewujudkan kota Ponorogo sebagai Kota Metropolitan yang berbasis Pertanian (Agropolitan). Strategi pembangunan ekonomi salah satunya adalah upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakatnya dengan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, artinya hasil-hasil dari kegiatan ekonomi daerah bisa dinikmati lebih merata dan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dapat memperkuat fundamental ekonomi. Karena dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan syarat harus ada investasi, sumber daya manusia, sumber daya alam.

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan dengan struktur ekonomi yang diharapkan, maka pembangunan perlu direncanakan dengan baik dan hasil pembangunan yang telah tercapai perlu untuk dievaluasi. Perencanaan dan evaluasi pembangunan tersebut akan terarah apabila dilandaskan pada statistik yang baik dan cermat.

Data statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ponorogo perlu disusun karena merupakan salah satu instrument yang dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan secara makro. Dengan tersedianya data PDRB dari tahun ke tahun, para pembuat kebijakan ekonomi Kabupaten Ponorogo akan mampu mengevaluasi hasil-hasil pembangunan pada suatu kurun waktu tertentu, dan itu dapat digunakan sebagai bahan perencanaan untuk pembangunan yang akan datang. Lebih dari itu, kemanfaatan data PDRB tidak terbatas pada lingkup Pemerintah Kabupaten Ponorogo, tetapi juga

bermanfaat bagi pengamat ekonomi, kalangan swasta, kalangan akademisi, dan pengguna data lainnya.

Berdasarkan Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) milik Pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan perstatistikan nasional dan daerah. Dari sifat independensi yang dimilikinya, BPS mampu memberikan data yang obyektif dan akurat serta bebas dari intervensi pihak manapun. Untuk mendukung perstatistikan daerah dan perencanaan pembangunan daerah, BPS Kabupaten Ponorogo melakukan penghitungan PDRB Kabupaten Ponorogo.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Di dalam perencanaan ekonomi suatu wilayah pada umumnya dimaksudkan untuk menyelesaikan dua masalah pokok berikut:

1. mengusahakan agar pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat; dan
2. mengusahakan agar pendapatan yang timbul tersebut dapat dibagi atau diterima oleh masyarakat secara lebih merata.

Permasalahan tersebut di atas secara kuantitas dapat dievaluasi dengan tersedianya data statistik PDRB. Hal ini dikarenakan PDRB mampu memberikan data statistik berupa:

1. Laju pertumbuhan perekonomian suatu daerah, baik secara menyeluruh maupun sektoral;
2. Tingkat kemakmuran melalui besarnya pendapatan.

3. Kemampuan daya beli masyarakat dengan melihat besarnya tingkat inflasi; dan
4. Potensi yang ada dengan melihat struktur perekonomian yang terjadi;

1.3 MANFAAT

Manfaat penyusunan PDRB ini untuk menjawab dua masalah pokok yaitu:

- a. sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya; dan
- b. sebagai bahan perencanaan bidang/aspek ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang baik bagi pemerintahan, dunia usaha, maupun masyarakat luas.

1.4 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Kegiatan ekonomi secara umum dapat dikelompokkan ke dalam kegiatan memproduksi dan kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa. Dari barang dan jasa yang dihasilkan dari unit produksi ini timbul pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang telah dimiliki oleh berbagai golongan dalam masyarakat, sehingga dari pendapatan ini masyarakat akan membeli barang dan jasa baik untuk keperluan konsumsi maupun investasi.

Dengan demikian, maka nilai produk akhir dari barang dan jasa yang diproduksi (*product*) akan sama dengan pendapatan yang diterima oleh golongan-golongan dalam masyarakat (*income*), dan akan sama pula dengan jumlah pengeluaran oleh berbagai golongan dalam masyarakat (*expenditure*).

Karena itu maka Produk Regional (*Regional Product*), Pendapatan Regional (*Regional Income*) dan Pengeluaran Regional (*Regional Expenditure*), sebenarnya sama. Hanya bagaimana cara kita melihatnya, maka **Produk Domestik Regional Bruto dapat didefinisikan sebagai berikut :**

1. **Kalau ditinjau dari segi produksi**, merupakan jumlah nilai produk akhir atau nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang dimiliki oleh penduduk wilayah itu dalam jangka waktu tertentu;
2. **Kalau ditinjau dari segi pendapatan**, merupakan jumlah pendapatan atau balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk wilayah itu yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu;
3. **Atau apabila ditinjau dari segi pengeluaran**, merupakan pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap perubahan stok dan ekspor neto.

Tetapi dari keterbatasan data yang ada, penghitungan PDRB Kabupaten Ponorogo tidak memungkinkan untuk memakai Pendekatan Pendapatan dan Pendekatan Pengeluaran sehingga yang dilakukan pada penghitungan PDRB pada publikasi ini memakai **pendekatan Produksi**. Artinya Pendapatan Regional yang diperoleh dari penghitungan PDRB, juga hanya ditinjau dari segi produksi, yaitu berasal dari total nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan unit-unit

produksi yang telah dikurangi dengan faktor penyusutan dan pajak tidak langsung neto dan ditambah oleh pendapatan neto dari luar daerah.

Meskipun demikian, pada Bab II nanti akan dijelaskan secara detail komponen pembentuk PDRB baik dari segi produksi, segi pendapatan, dan segi pengeluaran, agar pembaca mengerti lebih dalam mengenai Produk Domestik Regional Bruto, dan memahami mengapa pada penghitungan PDRB pada publikasi ini mengedepankan penghitungan dari segi produksi.

1.5 KEGUNAAN DARI ANGKA PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

PDRB yang disajikan dengan harga konstan akan bisa menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah itu, dan apabila ini dibagi dengan jumlah penduduk akan mencerminkan tingkat perkembangan produk per kapita.

Dari penghitungan PDRB akan diperoleh Pendapatan Regional suatu wilayah. Jika Pendapatan Regional ini dibagi dengan jumlah penduduk akan mencerminkan tingkat perkembangan pendapatan per kapita yang dapat digunakan sebagai indikator untuk membandingkan tingkat kemakmuran materiil suatu daerah terhadap daerah lain.

Penyajian atas dasar harga konstan bersama-sama dengan harga berlaku antara lain dapat dipakai sebagai indikator untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi (inflasi negatif) yang terjadi.

Penyajian PDRB secara sektoral dapat memperlihatkan struktur ekonomi di wilayah itu. Bila angka PDRB dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja, atau

jumlah input yang digunakan, akan dapat menggambarkan tingkat produktifitas secara sektoral maupun menyeluruh.

Penyajian dalam bentuk input-output dapat menggambarkan hubungan fungsional antara sektor satu dengan sektor lain, dan bagaimana kenaikan output suatu sektor mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kepada sektor-sektor lain.

Penyajian dalam bentuk Neraca Regional akan dapat digambarkan bagaimana barang dan jasa itu diproduksi, dikonsumsi, diinvestasikan maupun diekspor, dan bagaimana sumber-sumber pembiayaan terhadap konsumsi, investasi maupun ekspor/impor.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa angka-angka yang disajikan oleh PDRB dapat menggambarkan kondisi ekonomi yang terjadi.

Dengan demikian PDRB berfungsi sebagai :

1. Indikator tingkat pertumbuhan ekonomi;
2. Indikator tingkat pertumbuhan regional income per kapita;
3. Indikator tingkat kemakmuran;
4. Indikator tingkat inflasi;
5. Indikator struktur perekonomian; dan
6. Indikator hubungan antar sektor.



II

KONSEP DAN DEFINISI

II. KONSEP DAN DEFINISI

2.1 UMUM

Dalam Bab II ini akan diterangkan secara jelas mengenai konsep dan definisi yang berkaitan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ponorogo.

2.1.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ATAS DASAR HARGA PASAR

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar merupakan jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Yang dimaksud dengan nilai tambah bruto adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa, tanah dan keuntungan), penyusutan, dan pajak tak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkannya, akan menghasilkan produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar.

2.1.2 PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETO (PDRN) ATAS DASAR HARGA PASAR

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar **dikurangi penyusutan** akan diperoleh Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar.

Penyusutan yang dimaksud disini ialah nilai susut (aus) dari barang-barang yang ikut serta dalam proses produksi. Jika nilai susut barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, maka hasilnya merupakan penyusutan sebagai dimaksud di atas.

2.1.3 PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETO (PDRN) ATAS DASAR BIAYA FAKTOR

PDRN atas dasar biaya faktor adalah PDRN atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak langsung neto. Pajak tak langsung neto meliputi pajak penjualan, bea ekspor/impor, bea cukai, dan pajak lain-lain, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseroan. Pajak tidak langsung ini oleh unit-unit produksi dibebankan pada biaya produksi atau pada pembeli, sehingga pajak tidak langsung berakibat menaikkan harga barang, subsidi yang diberikan pemerintah kepada unit-unit produksi terutama unit-unit produksi yang dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, akan menurunkan harga dipasar. Dengan demikian pajak tidak langsung dan subsidi mempunyai pengaruh yang berlawanan terhadap harga barang dan jasa (*output produksi*).

Besarnya pajak tidak langsung dikurangi subsidi akan diperoleh **pajak tidak langsung neto**. Jika Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar **dikurangi dengan pajak tidak langsung neto**, maka hasilnya akan berupa Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor.

2.1.4 PENDAPATAN REGIONAL

Pendapatan regional neto adalah produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor dikurangi aliran dana yang mengalir keluar ditambah aliran dana yang mengalir masuk. Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa **upah/gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan** yang timbul, atau merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan di daerah tersebut.

Akan tetapi pendapatan yang dihasilkan tersebut tidak seluruhnya menjadi pendapatan penduduk daerah setempat, hal ini disebabkan ada sebagian pendapatan yang diterima oleh penduduk daerah lain. Misalnya suatu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh orang luar, tetapi perusahaan tadi beroperasi di daerah tersebut, maka dengan sendirinya keuntungan perusahaan itu sebagian akan menjadi milik orang luar yaitu milik orang yang mempunyai modal tadi. Sebaliknya kalau ada penduduk daerah ini yang menanamkan modalnya di luar daerah maka sebagian keuntungan akan mengalir ke daerah tersebut dan menjadi pendapatan dari pemilik modal.

Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor **dikurangi dengan pendapatan yang mengalir keluar, ditambah yang mengalir kedalam**, maka hasilnya akan merupakan **Produk Regional Neto**, yaitu **merupakan jumlah pendapatan** yang benar-benar diterima (*income receipt*) oleh seluruh penduduk yang tinggal di daerah tersebut. **Produk Regional Neto inilah yang merupakan Pendapatan Regional Daerah** tersebut. Bila pendapatan regional

ini dibagi dengan jumlah seluruh penduduk yang tinggal di daerah itu, maka hasilnya merupakan Pendapatan per kapita penduduk di daerah tersebut.

2.1.5 PERSONAL INCOME

Pendapatan perseorangan (***Personal Income***) adalah merupakan pendapatan yang diterima oleh Rumahtangga. Kalau kita memperhatikan konsep Pendapatan Regional maupun Pendapatan per kapita penduduk seperti tersebut di atas, maka sebenarnya tidak semua Pendapatan Regional tersebut diterima oleh rumahtangga, karena harus dipotong pajak pendapatan (*corporate income taxes*), keuntungan yang tidak dibagikan (*undistributed profits*), dan iuran kesejahteraan sosial (*social security contribution*).

Sebaliknya pendapatan tersebut harus ditambah dengan transfer yang diterima oleh rumahtangga dan bunga neto atas hutang pemerintah. Jadi kalau Pendapatan Regional dikurangi pajak pendapatan, keuntungan yang tidak dibagikan dan iuran kesejahteraan sosial, kemudian ditambah dengan transfer yang diterima oleh rumahtangga dan bunga neto atas hutang pemerintah, maka akan diperoleh ***Personal Income***.

2.1.6 DISPOSABLE INCOME

Apabila pendapatan perseorangan (*personal income*) tersebut **dikurangi dengan pajak perorangan, pajak rumahtangga/PBB dan transfer yang dibayar oleh rumahtangga**, maka akan diperoleh **Pendapatan yang benar-benar Siap Dibelanjakan (*Disposable Income*)**.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat disusun Agregat Pendapatan Regional sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar
Dikurangi "Penyusutan", sama dengan
2. Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar
Dikurangi "Pajak tak langsung", sama dengan
3. Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor
Ditambah "Pendapatan yang masuk dari luar daerah/luar negeri",
Dikurangi "Pendapatan yang mengalir keluar daerah/luar negeri",
sama dengan
4. Pendapatan Regional
Dikurangi "Pajak Pendapatan", "Keuntungan yang tidak dibagikan" dan
"Turan kesejahteraan sosial",
Ditambah "Transfer yang diterima oleh rumahtangga" dan "Bunga neto
atas hutang pemerintah", sama dengan
5. Pendapatan orang-seorang (*Personal Income*)
Dikurangi "Pajak rumahtangga" dan "Transfer yang dibayar oleh
Rumahtangga", sama dengan
6. Pendapatan Yang Siap Dibelanjakan (*Disposable Income*)
Pendapatan Yang Siap Dibelanjakan inilah yang merupakan pendapatan yang
benar-benar dapat digunakan dan dinikmati oleh rumah tangga.

2.2 METODE PENGHITUNGAN PENDAPATAN REGIONAL

Metode perhitungan pendapatan regional pada tahap pertama dapat dibagi dalam dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah perhitungan dengan menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan kondisi daerah dan digali dari sumber data yang ada di daerah itu sendiri. Metode langsung dapat dilakukan dengan mempergunakan tiga macam cara, yaitu :

- Pendekatan dari **segi produksi** (*production approach*);
- Pendekatan dari **segi pendapatan** (*income approach*);
- Pendekatan dari **segi pengeluaran** (*expenditure approach*); dan

2.2.1 PENDEKATAN PRODUKSI

Pendekatan dengan cara ini dilakukan untuk mendapat Nilai Tambah Bruto (*Gross Value Added*) atau disingkat menjadi NTB, dengan cara mengurangi nilai output dengan biaya antara (*Intermediate Consumption*). Yang dimaksud dengan output adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di daerah tersebut dalam satu periode tertentu (biasanya satu tahun). Dan yang dimaksud dengan biaya antara (*Intermediate consumption*) adalah barang-barang tidak tahan lama (umur pemakaiannya kurang dari satu tahun atau habis dalam satu kali pemakaian) dan jasa-jasa pihak lain yang digunakan dalam proses produksi. Jadi, apabila nilai output dikurangi dengan biaya antara, maka akan diperoleh **Nilai Tambah Bruto yang terdiri dari** biaya faktor produksi

(upah/gaji, bunga neto, sewa tanah, keuntungan), penyusutan barang modal dan pajak tak langsung neto.

Nilai output biasanya digunakan data sekunder dari instansi yang bersangkutan. Sedangkan biaya antara diperoleh dari hasil Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR). Penghitungan dengan pendekatan produksi ini biasanya digunakan untuk sektor pertanian, industri, gas, air minum, pertambangan dan sebagainya.

2.2.2 PENDEKATAN PENDAPATAN

Pendekatan dengan cara ini dapat dilakukan dengan secara langsung menjumlahkan pendapatan, yaitu **jumlah balas jasa faktor produksi** berupa upah/gaji, bunga neto, sewa tanah dan keuntungan, sehingga diperoleh Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor. Untuk memperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar, harus ditambah dengan **penyusutan** dan **pajak tak langsung neto**.

Kenyataannya penghitungan ini sangat sulit digunakan karena bunga neto sulit didapatkan informasinya di lapangan.

Penghitungan dengan pendekatan pendapatan (*income approach*) ini biasanya digunakan untuk kegiatan yang sulit dihitung dengan pendekatan produksi, seperti sektor pemerintah dan jasa yang usahanya tidak mencari untung (*non profit*).

2.2.3 PENDEKATAN PENGELUARAN

Pendekatan dengan cara ini digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai golongan dalam masyarakat. Barang dan jasa yang diproduksi oleh unit-unit produksi akan digunakan untuk keperluan konsumsi, pembentukan modal (investasi) dan ekspor.

Barang-barang yang digunakan ini ada yang berasal dari produksi dalam daerah (domestik) dan yang berasal dari luar daerah/impor. Karena yang dihitung hanya nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi domestik saja, maka dari komponen biaya di atas perlu dikurangi dengan nilai impor sehingga komponen nilai ekspor di atas akan menjadi nilai ekspor neto. Apabila nilai konsumsi (konsumsi rumah tangga, pemerintah dan yayasan sosial), nilai pembentukan modal dan ekspor neto dijumlahkan, maka akan diperoleh nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

Dalam penghitungan tersebut digunakan rumus sebagai berikut :

$$PDRB = C + I + G + (X - M)$$

dimana C = Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga;

I = Pembentukan Modal Tetap;

G = Pengeluaran Konsumsi Pemerintah;

X = Nilai Ekspor;

M = Nilai Impor

Kenyataannya, pengumpulan data untuk metode ini sangat sulit. Hal ini dikarenakan komponen Ekspor dan Impor sangat sulit diperoleh. Misalnya barang-

barang dan jasa yang dibeli penduduk di luar Kabupaten Ponorogo sangat sulit dihitung besaran nilainya (dalam hal ini nilai ekspor), dan sebaliknya sangat sulit memperoleh besaran impor dari penggunaan barang-barang atau jasa yang berasal dari luar Kabupaten Ponorogo oleh penduduk Kabupaten Ponorogo.

2.2.4 METODE TIDAK LANGSUNG/ALOKASI

Metode tidak langsung adalah suatu cara mengalokasikan produk domestik bruto dari wilayah yang lebih luas ke masing-masing bagian wilayah, misalnya mengalokasikan PDRB Propinsi ke setiap Kabupaten/Kota dengan menggunakan alokator tertentu yang dapat digunakan, yaitu :

1. nilai produksi bruto atau neto setiap sektor/subsektor, pada wilayah yang dialokasikan,
2. jumlah produksi fisik,
3. tenaga kerja,
4. penduduk, dan
5. alokator tidak langsung lainnya.

Dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari beberapa alokator dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing Kabupaten/Kota terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsektor. Metode ini terkadang terpaksa digunakan karena adanya kegiatan usaha yang lokasinya ada di beberapa wilayah, sedangkan pencatatan yang lengkap hanya dilakukan di kantor pusat. Misalnya, laba perusahaan tidak tercatat pada masing-masing wilayah melainkan hanya

tercatat di kantor pusat. Contoh lain apabila proses produksi bersifat berantai dan masing-masing mata rantai berada pada wilayah yang berbeda.

2.3 STRUKTUR PEMBENTUK PDRB

Untuk dapat memberi gambaran sampai seberapa jauh peranan masing-masing sektor ekonomi memberikan andil dalam berproduksi, atau sampai seberapa jauh peranan faktor-faktor produksi berpartisipasi dalam proses produksi, atau bagaimana komposisi penggunaan produk-produk yang dihasilkan tadi, maka biasanya PDRB disajikan dalam 3 bentuk :

1. PDRB menurut lapangan usaha (*by industriil origins*);
2. PDRB menurut andilnya faktor-faktor produksi;
3. PDRB menurut jenis penggunaan (*by type of expenditure*).

2.3.1 PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

Penyajian dalam bentuk ini dapat memberikan gambaran tentang peranan masing-masing sektor dalam memberikan andilnya pada PDRB. Karena itu unit-unit produksi dikelompokkan kedalam sektor-sektor sebagai berikut:

1. Pertanian;
2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Industri Pengolahan;
4. Listrik, Gas dan Air Bersih;
5. Konstruksi;
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran;

7. Pengangkutan dan Komunikasi;
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; dan
9. Jasa-jasa.

2.3.2 PDRB MENURUT ANDILNYA FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI

Penyajian dalam bentuk ini dapat memberikan gambaran tentang peranan masing-masing faktor produksi dalam memberikan andil pada PDRB. Karena itu disajikan balas jasa yang diterima oleh masing-masing faktor produksi yaitu dalam bentuk **upah/gaji, sewa tanah, bunga dan keuntungan**.

Adanya unit-unit produksi yang faktor-faktor produksinya sekaligus dimiliki sendiri oleh produsen seperti : petani, pelukis dan pekerja profesional lainnya, maka terlalu sukar untuk memisahkan nilai tambahnya dalam komponen-komponen faktor-faktor pendapatan, hingga perlu ditambahkan satu perincian lagi untuk menampung hal seperti ini, yaitu usaha perorangan (*non corporated enterprices*).

Dengan demikian maka item-item yang keluar pada tabel yang disajikan menjadi :

1. Upah/Gaji (*Compensation of employees*);
2. Pendapatan dari usaha perorangan (*Income from non corporated enterprices*);
3. Sewa Tanah (*Rental Income*);
4. Keuntungan (*Corporated Profit*);
5. Bunga neto (*Net Interest*).

Secara detail item-item di atas dijelaskan sebagaimana berikut ini.

2.3.2.1 UPAH/GAJI

Yang tercakup disini ialah balas jasa faktor produksi buruh/pegawai yang meliputi :

1. Upah dan gaji baik berupa uang maupun berupa barang, sebelum dipotong pajak upah, dana pensiun, asuransi kesehatan;
2. Pembayaran yang berbentuk hadiah, premi, bonus dan segala macam tunjangan lainnya;
3. *Social security contribution*, meliputi pembayaran kontribusi yang dilakukan oleh pengusaha untuk keperluan pegawai-pegawainya, misalnya untuk dana asuransi, dana kesehatan dan pensiun, dan sebagainya.

2.3.2.2 PENDAPATAN USAHA PERORANGAN

Yang tercakup di sini ialah pendapatan yang ditimbulkan oleh unit-unit produksi yang tidak berbentuk perusahaan, misalnya petani-petani, dokter, pedagang kecil, tukang cukur dan sebagainya. Di sini biasanya faktor produksinya tidak dibeli dari luar tetapi dimiliki oleh unit-unit produksi itu sendiri, maka pendapatan yang ditimbulkan sukar dipisahkan menjadi komponen-komponen balas jasa faktor produksinya, hingga nilai tambahnya dikeluarkan dalam bentuk gabungan dalam item ini.

2.3.2.3 SEWA TANAH

Yang tercakup disini ialah pendapatan yang ditimbulkan oleh :

1. Ikut sertanya faktor produksi tanah dalam proses produksi. Dengan tidak memperhatikan/melihat untuk apa tanah itu digunakan (apakah untuk

pertanian, perikanan atau untuk bangunan), maka sewa yang timbul dimasukkan dalam *rental income* ini;

2. Pemilikan atas hak patent, hak cipta (*copyright*), merk dagang dan sejenisnya dimasukkan juga dalam item ini.

2.3.2.4 KEUNTUNGAN

Yang tercakup disini ialah keuntungan perusahaan sebelum dipotong pajak perusahaan dan pajak langsung lainnya, dan sebelum dibagikan sebagai deviden.

2.3.2.5 BUNGA NETO

Bunga neto mencakup bunga atas piutang maupun surat-surat berharga lainnya yang diterima oleh penduduk maupun Pemerintah dikurangi bunga atas hutang pemerintah kepada penduduk, jika hutang tersebut dipakai untuk konsumsi pemerintah berarti uang ini tidak ikut serta dalam proses produksi, sehingga bunganya bukan balas jasa faktor produksi. Seperti disebutkan di atas, bahwa PDRB merupakan balas jasa faktor produksi, maka bunga yang demikian bukan bagian dari Pendapatan Regional dan harus dikeluarkan dari Pendapatan Regional, untuk selanjutnya dianggap sebagai transfer. Selain itu perlu diadakan imputasi atas bunga dari uang-uang penduduk yang disimpan sebagai tanggungan di perusahaan-perusahaan, sebagai asuransi jiwa, dana pensiun, dan sebagainya dan imputasi ini dimasukkan dalam item di atas.

2.3.3 PDRB MENURUT JENIS PENGGUNAAN

(BY TYPE OF EXPENDITURE)

Penyajian dalam bentuk ini dapat memberi gambaran, bagaimana barang dan jasa yang telah diproduksi itu digunakan oleh berbagai golongan dalam

masyarakat. Untuk keperluan ini maka barang dan jasa itu dikelompokkan menurut penggunaannya dalam masyarakat, yaitu digunakan untuk keperluan konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung (*private consumption expenditures*), ditanam sebagai barang modal (*fixed capital formation*), yang tidak digunakan pada tahun laporan akan disimpan sebagai stock (*increase in stock*) dan digunakan untuk barang ekspor neto.

Jadi penyajiannya akan berbentuk :

1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga dan Lembaga Swasta yang Tidak Mencari Untung (Nirlaba);
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah;
3. Pembentukan Modal Tetap;
4. Perubahan Stok;
5. Ekspor Neto.

Detail keterangan item-item di atas diuraikan sebagaimana berikut ini.

2.3.3.1 PENGELUARAN KONSUMSI RUMAHTANGGA

Pengeluaran konsumsi rumahtangga mencakup pengeluaran yang dilakukan oleh rumahtangga untuk membeli barang-barang dan jasa tanpa melihat *durability* dari barang dan jasa itu, dikurangi penjualan dari barang bekas neto (penjualan-pembelian barang bekas neto), dengan mengecualikan pengeluaran yang bersifat transfer, pembelian tanah dan rumah. Perkecualian ini dilakukan sebab transfer akan dihitung sebagai pengeluaran pada konsumen yang

menerima transfer tadi, sedang pengeluaran untuk tanah dan rumah dimasukkan dalam item Pembentukan Modal (*Capital Formation*).

Kecuali pengeluaran yang dilakukan oleh rumahtangga yang tercakup dalam item ini ialah pengeluaran rutin yang dilakukan oleh lembaga nirlaba (lembaga swasta yang tidak mencari untung). Pengeluaran yang dilakukan oleh lembaga ini untuk pembelian barang-barang modal akan dimasukkan dalam item pembentukan modal tetap. Pengeluaran konsumsi rumahtangga lembaga swasta yang tidak mencari untung ini disebut *Private Consumption Expenditure*.

2.3.3.2 PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH

Item ini mencakup pengeluaran rutin untuk pembelian barang dan jasa dari pihak lain yang dilakukan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dikurangi hasil penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah. Pengeluaran rutin di sini meliputi pembayaran upah dan gaji kepada pegawai-pegawai pemerintah, belanja barang, biaya-biaya pemeliharaan dan biaya-biaya rutin lain. Termasuk juga pengeluaran belanja modal untuk keperluan militer.

Belanja modal untuk keperluan sipil misalnya pembelian mobil, mesin, pembuatan gedung, jalan, jembatan dan sebagainya akan dimasukkan dalam pembentukan modal tetap, sedang pembelian seperti di atas, tetapi untuk keperluan militer dimasukkan dalam Pengeluaran Konsumsi Pemerintah ini. Pengeluaran rutin tersebut harus dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya penjualan buku-buku penerbitan

oleh dinas-dinas, penjualan bibit padi dan telur dari pusat pembibitan milik pemerintah dan sebagainya.

2.3.3.3 PEMBENTUKAN MODAL TETAP

Pembentukan modal tetap (*Gross Fixed Capital Formation*) ditambah perubahan stok (*Increase in Stock*) biasanya disebut *Gross Capital Formation*, sebab memang keduanya merupakan jumlah perubahan stok barang, baik barang-barang yang sudah ditanam maupun yang masih disimpan. Hanya untuk memudahkan penghitungan kedua item ini perlu dipisahkan.

Apa yang tercakup dalam perubahan stok akan dibicarakan kemudian, sedang yang masuk dalam pembentukan modal tetap mencakup besarnya modal yang ditanam selama satu tahun, baik oleh pemerintah, swasta, lembaga swasta yang tidak mencari untung maupun rumahtangga (terbatas pada tanah dan rumah), dikurangi dengan jumlah penjualan barang-barang modal bekas selama tahun sama. Yang tercakup dalam barang modal tetap biasanya umurnya lebih dari satu tahun (*durable procedure goods*), misalnya tanah, rumah, gedung, jalan, jembatan, dam, mesin, alat transport, dan sebagainya.

Selain itu termasuk juga dalam pembentukan modal tetap pembelian/penambahan ternak yang dipelihara untuk diambil susunya, tenaganya, bulunya, dan sebagainya. Sedang pembelian/penambahan ternak yang dipelihara untuk diambil dagingnya (dipotong) akan dimasukkan dalam pembentukan modal stok.

Dalam item ini termasuk juga pengeluaran untuk penanaman hutan baru, perkebunan tanaman keras yang baru bisa dipetik hasilnya setelah berumur lebih dari satu tahun.

2.3.3.4 PERUBAHAN STOK

Perubahan stok ialah barang-barang yang diproduksi sendiri maupun yang diimpor pada tahun itu, tapi belum sempat dipakai sampai akhir tahun hingga masih disimpan sebagai stok.

Stok yang disimpan ini meliputi barang-barang mentah yang belum sempat diproses menjadi barang lain, barang yang masih dalam proses (*work in process*) dan barang-barang jadi yang belum sempat dijual. Seperti yang disebutkan di atas termasuk juga dalam perubahan stok ini ialah penambahan ternak yang dipelihara untuk dipotong.

2.3.3.5 EKSPOR NETO

Ekspor Neto di sini berarti selisih antara ekspor dan impor dari barang dan jasa. Ekspor barang dan jasa meliputi ekspor barang-barang yang dijual keluar negeri (di luar daerah yang dihitung PDRB-nya), dimana termasuk didalamnya barang-barang dagangan (*merchandise*), jasa transport, asuransi dan jasa-jasa lain.

Begitu pula untuk impor termasuk barang-barang dagangan, jasa-jasa lain yang dibeli dari luar negeri. Juga termasuk dalam ekspor dan impor disini ialah pengeluaran/pemasukan barang yang bersifat pemberian/hadiah ke/dari negara-

negara lain dan barang-barang yang diekspor/impor dengan dibiayai oleh uang yang diperoleh dari transfer antar negara. Tetapi kalau pengeluaran/pemasukan barang yang bersifat hadiah/pemberian ini dimaksud untuk keperluan militer tidak termasuk dalam item Ekspor/Impor ini.

2.4 PENYAJIAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN

Salah satu kegunaan dari Produk Domestik Regional Bruto ialah untuk melihat perkembangan riil produk domestik dari tahun ke tahun. Karena adanya pengaruh inflasi, maka daya beli uang akan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berkaitan dengan itu apakah kenaikan PDRB itu benar-benar naik atau tidak, maka faktor inflasi ini terlebih dahulu harus dieliminir. Setelah faktor inflasi dieliminir, maka PDRB yang dihasilkan akan merupakan PDRB yang riil (*real*) yang besarnya hanya dipengaruhi oleh jumlah produksinya saja.

PDRB yang masih mengandung faktor inflasi didalamnya adalah merupakan PDRB atas dasar harga yang berlaku (*at current prices*) atau biasa ditulis **ADHB**, sedang bila faktor inflasi sudah dieliminir akan merupakan PDRB atas dasar harga konstan (*at constant prices*) atau biasa ditulis **ADHK**.

Untuk merubah angka atas dasar harga berlaku menjadi angka atas dasar konstan, ada tiga metode dasar yang dapat dipakai yaitu : **revaluasi**, **ekstrapolasi** dan **deflasi**.

2.4.1 REVALUASI

Cara ini diperoleh dengan menilai produksi pada tahun yang bersangkutan dengan memakai harga pada tahun dasar. Begitu juga biaya-biaya antara dinilai dengan memakai harga pada tahun dasar pula. Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan karena mencakup komponen biaya antara yang sangat banyak, disamping data harga yang tersedia tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu, biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan masing-masing tahun dengan rasio biaya antara terhadap output pada tahun dasar.

Cara revaluasi ini secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

$$NP_{ij}^{ADHK} = Q_{ij} \times P_{i0}$$

dimana NP_{ij}^{ADHK} = Nilai produksi komoditas ke-i pada tahun ke-j ADHK;

Q_{ij} = Quantum komoditas ke-i pada tahun ke-j;

P_{i0} = Harga komoditas ke-i pada tahun dasar.

Untuk lebih jelasnya disajikan contoh penghitungan nilai produksi pada tahun 2010 dengan mengacu pada tahun dasar 2000 atau biasa ditulis (2000 = 100). Maksud penulisan (2000 = 100) tersebut mengartikan bahwa tahun 2000 sebagai tahun dasar dan seluruh pengindekkan angka-angka pada tahun itu sama dengan 100.

Tabel 2.1

CONTOH PENGHITUNGAN METODE REVALUASI

2000=100

Uraian	Satuan	2000	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
Kuantum	buah	7.500.000	9.000.000
Harga	Rp.	3.500	4.000
Nilai Produksi ADHB	Rp.	26.250.000.000	36.000.000.000
Nilai Produksi ADHK	Rp.	26.250.000.000	31.500.000.000

Keterangan:
 ADHB = Atas Dasar Harga Berlaku
 ADHK = Atas Dasar Harga Konstan

$7.500.000 \times 3.500$

$9.000.000 \times 3.500$

2.4.2 EKSTRAPOLASI

Cara ini diperoleh dengan mengekstrapolasi nilai tambah pada tahun dasar dengan menggunakan indeks kuantum dari barang-barang yang bersangkutan yang diproduksi. Bila terdapat kesulitan dalam memperoleh indeks kuantum dapat dipakai indikator lain yang ada hubungannya dengan indeks kuantum produksi itu, misalnya indeks tenaga kerja di bidang itu, indeks kuantum dari input yang dipakai dan sebagainya. Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap output atas dasar harga konstan, kemudian dengan menggunakan rasio tetap nilai tambah terhadap output akan diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

Secara matematis penghitungan ekstrapolasi dirumuskan sebagai berikut:

$$NP_{ij}^{ADHK} = NP_{i0} \times \frac{IP_{ij}}{IP_{i0}}$$

dimana NP_{ij}^{ADHK} = Nilai produksi komoditas ke-i pada tahun ke-j ADHK;
 NP_0 = Nilai produksi komoditas ke-i pada tahun dasar;
 IP_{ij} = Indeks kuantum komoditas ke-i pada tahun ke-j;
 IP_0 = Indeks kuantum komoditas ke-i pada tahun dasar.

Tabel 2.2

CONTOH PENGHITUNGAN METODE EKSTRAPOLASI

2000=100

Uraian	Satuan	2000	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
Kuantum		7.500.000	9.000.000
Indek Kuantum		100,00	120,00
Nilai Produksi ADHB	Rp.	26.250.000.000	
Nilai Produksi ADHK	Rp.	26.250.000.000	31.500.000.000

Keterangan:
 ADHB = Atas Dasar Harga Berlaku
 ADHK = Atas Dasar Harga Konstan

Calculation boxes:
 - For Kuantum Index: $(7.500.000/7.500.000) \times 100$
 - For ADHK 2010: $26.250.000.000 \times (120,00/100,00)$
 - For ADHK 2010 (alternative): $26.250.000.000 \times (9.000.000/7.500.000) \times 100$

2.4.3 DEFLASI

Cara ini diperoleh dengan mendeflate nilai tambah atas dasar harga yang berlaku dengan indeks harga dari barang-barang yang bersangkutan. Indeks harga disini dapat dipakai indeks harga perdagangan besar, harga produsen maupun harga eceran tergantung mana yang lebih cocok. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

$$NP_{ij}^{ADHK} = NP_{ij}^{ADHB} \times \frac{IH_{i0}}{IH_{ij}}$$

dimana NP_{ij}^{ADHK} = Nilai produksi komoditas ke-i pada tahun ke-j ADHK;
 NP_{ij}^{ADHB} = Nilai produksi komoditas ke-i pada tahun ke-j ADHB;
 IH_{ij} = Indeks harga komoditas ke-i pada tahun ke-j;
 IH_0 = Indeks harga komoditas ke-i pada tahun dasar.

Tabel 2.3

CONTOH PENGHITUNGAN METODE DEFLASI

2000=100

Uraian	Satuan	2000	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
			$(4.000/3.500) \times 100$
Harga	$(3.500/3.500) \times 100$	3.500	4.000
Indek Harga		100,00	114,29
Nilai Produksi ADHB	Rp.	26.250.000.000	36.000.000.000
Nilai Produksi ADHK	Rp.	26.250.000.000	31.500.000.000

Keterangan:
ADHB = Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK = Atas Dasar Harga Konstan

$26.250.000.000 \times (100,00/100,00)$

$36.000.000.000 \times (100,00/114,29)$

Selain dari pada tiga metode dasar tersebut di atas, ada empat pendekatan untuk menghitung nilai tambah sektoral atas dasar harga konstan, tiga diantaranya didasarkan pada pendekatan produksi yang dipakai untuk penghitungan nilai tambah dan yang satunya didasarkan pada pendekatan pendapatan. Empat pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :

2.4.3.1 DEFLASI GANDA

Deflasi ganda dilakukan apabila nilai tambah atas dasar harga konstan dihitung secara terpisah dari input antara atas dasar harga konstan. Nilai tambah atas dasar harga konstan merupakan selisih antara output dan input antara atas

dasar harga konstan. Untuk menghitung output dan input antara atas dasar harga konstan itu dapat dipakai salah satu atau kombinasi dari metode dasar tersebut di atas. Perlu diperhatikan bahwa istilah deflasi yang digunakan disini adalah dalam arti yang lebih luas.

2.4.3.2 EKSTRAPOLASI LANGSUNG TERHADAP NILAI TAMBAH

Ekstrapolasi dari nilai tambah sektoral dapat dilakukan dengan menggunakan perkiraan-perkiraan dari penghitungan output atas dasar harga konstan (yang didasarkan pada metode revaluasi, ekstrapolasi atau deflasi) atau dapat secara langsung menggunakan indeks produksi yang sesuai, atau tingkat pertumbuhan riil yang lalu dari output, input antara atau nilai tambah kemudian dikalikan dengan rasio nilai tambah sektoral tahun dasar. Secara implisit pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa output atas dasar harga konstan berubah sejalan dengan input atas dasar harga konstan atau rasio input antara riil boleh dikatakan tetap. Asumsi itu akan cocok bila perubahan teknologi dari sektor yang bersangkutan relatif kecil. Dalam beberapa hal pendekatan ini akan lebih mudah bila digunakan dalam jangka pendek atau bila rasio input antara adalah kecil.

2.4.3.3 DEFLASI LANGSUNG TERHADAP NILAI TAMBAH

Deflasi dari nilai tambah sektoral dilakukan dengan menggunakan indeks harga implisit dari output atau secara langsung menggunakan indeks harga produksi yang sesuai, kemudian dijadikan angka pembagi terhadap nilai tambah

sektoral atas dasar harga berlaku. Secara implisit pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa inflasi yang terjadi pada output dianggap sama dengan inflasi pada input antara. Asumsi ini akan lebih mudah bila digunakan dalam jangka pendek atau bila rasio input antara adalah kecil.

2.4.3.4 DEFLASI KOMPONEN PENDAPATAN

Komponen-komponen pendapatan dari nilai tambah pada dasarnya erat kaitannya dengan tenaga kerja, modal dan manajemen. Karena khususnya keuntungan berkaitan dengan manajemen maka perubahan kualitas tenaga kerja dan modal akan menyebabkan kesulitan-kesulitan, pendekatan ini hanya digunakan untuk sektor-sektor dimana tiga pendekatan di atas tidak mungkin digunakan karena tidak tersedianya data dasar atau indeks output yang sesuai. Pendekatan ini akan lebih cocok bila nilai tambah terutama terdiri dari kompensasi tenaga kerja dan penyusutan.

2.5 REBASING TAHUN DASAR (2000 = 100)

Rebasing adalah proses penetapan kembali tahun dasar baru yang digunakan dalam pengukuran PDRB, atau untuk selanjutnya disebut sebagai tahun rujukan penilaian (*reference year*). Dari tahun 1994 hingga tahun 2003, penghitungan PDRB yang sudah dipublikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan tahun dasar 1993. Artinya untuk memperoleh pertumbuhan riil PDRB, variabel harga didasarkan pada harga-harga pada tahun 1993.

Mengingat begitu lamanya tahun dasar yang dijadikan sebagai rujukan penilaian, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan kepada seluruh negara agar memperbaharui teknik penghitungan *Gross Domestic Product* (GDP) atau yang kita kenal sebagai PDRB, dengan memakai tahun yang dianggap "up to date" terhadap perkembangan yang telah terjadi.

Tahun dasar baru yang akan dipakai penghitungan PDRB menggantikan tahun dasar 1993 adalah tahun 2000. Pada tingkat Nasional dan Regional pada umumnya, menganggap bahwa tahun 2000 adalah tahun yang lebih representatif untuk penghitungan PDRB saat ini. Di samping itu, penghitungan tahun dasar yang direkomendasikan dunia (PBB) yaitu dengan menggunakan tahun yang berakhir angka 5 atau angka 0. Ini juga mempunyai makna bahwa sebaiknya penggantian tahun dasar itu dilakukan 5 atau 10 tahun sekali jika memungkinkan.

Rebasing tahun dasar ke tahun 2000 ini berkonsekuensi harus dilakukannya pembenahan data dasar (jumlah produk dan harga), dan perluasan cakupan bila pada penghitungan dengan tahun dasar 1993 terlewati. Konsekuensi lainnya, bahwa data tahun 2001-2004 yang sebelumnya juga memakai rujukan tahun dasar 1993, harus diperbaiki dengan merujuk data pada tahun 2000.

Penulisan tahun dasar biasanya ditulis sebagai "tahun dasar = 100". Jika tahun 2000 dijadikan tahun dasar, maka penulisannya dengan notasi 2000 = 100.

2.6 NILAI TAMBAH BRUTO, CARA PENYAJIAN, DAN ANGKA INDEKS

Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah nilai yang didapatkan dari pengurangan nilai output dengan biaya antaranya yang dirumuskan sebagai berikut:

$$NTB = O - BA$$

dimana NTB = nilai tambah dari suatu produksi barang atau jasa;

O = nilai output suatu barang atau jasa;

BA = nilai biaya antara yang digunakan dalam proses produksi.

Dalam membicarakan pendapatan dan pertumbuhan suatu wilayah kita harus mengetahui arti/konsep nilai tambah. Nilai produksi tidak sama dengan nilai tambah karena didalam nilai produksi telah terdapat biaya antara (*intermediate cost*), yaitu biaya pembelian/biaya perolehan dari sektor lain yang telah dihitung sebagai produksi di sektor lain atau berasal dari impor. Misalnya : produksi tepung beras akan menjadi input antara bagi produksi kue. Misalnya : beras dihitung disektor pertanian dan disektor industri penggilingan beras menjadi tepung. Jika bahan baku yang digunakan di impor dari wilayah lain, berarti nilai bahan baku itu telah dihitung sebagai pendapatan di wilayah lain.

Agregat-agregat pendapatan regional (PDRB) secara series selalu disajikan dalam dua bentuk, yaitu atas **dasar harga yang berlaku** dan **atas dasar harga konstan suatu tahun dasar**;

1. Pada penyajian atas dasar harga yang berlaku, semua agregat pendapatan regional dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing

tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah.

2. Pada penyajian atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, semua agregat pendapatan regional dinilai atas dasar harga tetap yang terjadi pada tahun dasar, sehingga perkembangan agregat pendapatan regional dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan riil produksinya dan bukan pengaruh kenaikan harga.

Agregat-agregat pendapatan regional juga disajikan dalam bentuk angka-angka persentase dan angka-angka indeks yang diterangkan sebagai berikut:

1. **Peranan Sektoral;** adalah suatu angka yang disajikan dalam bentuk persentase yang diperoleh dengan cara membagi nilai masing-masing sektor dengan nilai total seluruh sektor PDRB dikalikan 100 persen pada tahun yang bersangkutan. Penghitungan peranan sektoral ini dapat diperoleh dari rumus:

$$P_i = \frac{PDRB_i}{\sum_{i=1}^9 PDRB_i} \times 100\%$$

dimana P_i = Peranan sektor i;

$PDRB_i$ = PDRB sektor i.

2. **Indeks perkembangan;** adalah angka indeks yang diperoleh dengan membagi nilai-nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun dasar yang dikalikan 100. Angka indeks ini diperoleh dari rumus:

$$IP_{it} = \frac{PDRB_{it}}{PDRB_{i0}} \times 100$$

dimana IP_{it} = Indeks Perkembangan sektor i tahun t;

$PDRB_{it}$ = PDRB sektor i pada tahun t;

$PDRB_{i0}$ = PDRB sektor i pada tahun dasar.

3. **Indeks berantai**, adalah angka indeks yang diperoleh dengan membagi nilai-nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun sebelumnya yang dikalikan 100.

$$IB_{it} = \frac{PDRB_{it}}{PDRB_{i(t-1)}} \times 100$$

dimana IB_{it} = Indeks Berantai sektor i tahun t;

$PDRB_{it}$ = PDRB sektor i pada tahun t;

$PDRB_{i(t-1)}$ = PDRB sektor i pada tahun t -1.

Dari indeks ini yang dihitung atas dasar harga konstan diperoleh laju pertumbuhan masing-masing yaitu dengan mengurangi dengan 100.

4. **Angka laju pertumbuhan**; adalah angka berbentuk persentase yang diperoleh dengan mengurangi Indeks Berantai ADHK dengan 100, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$GROWTH_{it} = \left(IB_{it}^{ADHK} - 100 \right) \%$$

dimana $GROWTH_{it}$ = Pertumbuhan sektor i tahun t;

IB_{it}^{ADHK} = Indeks Berantai ADHK sektor i tahun t.

5. **Indeks Harga Implisit**; adalah angka indeks yang diperoleh dengan membagi nilai atas dasar harga yang berlaku dengan nilai atas dasar harga konstan untuk masing-masing tahunnya dikalikan 100.

$$IHI_{it} = \frac{PDRB_{it}^{ADHB}}{PDRB_{it}^{ADHK}} \times 100$$

dimana IHI_{it} = Indeks Harga Implisit sektor i tahun t;

$PDRB_{it}^{ADHB}$ = Indeks Berantai ADHB sektor i tahun t;

$PDRB_{it}^{ADHK}$ = Indeks Berantai ADHK sektor i tahun t.

6. **Inflasi**; adalah angka yang diperoleh dari persentase perubahan Indeks Harga Implisit, atau secara matematis bisa ditulis:

$$INFLATION_{it} = \left(\frac{IHI_{it} - IHI_{i(t-1)}}{IHI_{i(t-1)}} \right) \times 100\%$$

dimana $INFLATION_{it}$ = Inflasi sektor i tahun t;

IHI_{it} = Indeks Harga Implisit sektor i pada tahun t;

$IHI_{i(t-1)}$ = Indeks Harga Implisit sektor i pada tahun t -1.



III

URAIAN SEKTORAL

III. URAIAN SEKTORAL

Sebagaimana yang telah disinggung pada bab terdahulu, dari keterbatasan data yang tersedia, PDRB yang dihitung di sini sebagian besar didasarkan pada **pendekatan produksi**, yang penyajiannya dibedakan dalam **9 sektor** meliputi Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, dan Sektor Jasa-jasa. Pada Bab III ini akan dijelaskan definisi sektor-sektor pembentuk PDRB tersebut, dan cara penghitungan nilai tambah baik atas dasar harga yang berlaku maupun atas dasar harga konstan.

3.1 SEKTOR PERTANIAN

Sektor ini terdiri dari 5 subsektor meliputi Subsektor Tanaman Bahan Makanan (Tabama), Subsektor Perkebunan, Subsektor Peternakan, Subsektor Kehutanan, dan Subsektor Perikanan.

3.1.1 TANAMAN BAHAN MAKANAN

Subsektor ini mencakup komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedele, sayur-sayuran, buah-buahan, kentang, kacang hijau, tanaman pangan lainnya, dan hasil

produk ikutannya. Termasuk pula di sini hasil dari pengolahan yang dilakukan secara sederhana, termasuk dalam kategori ini adalah usaha tanaman hias.

Data produksi diperoleh dari Dinas Pertanian Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ponorogo, sedangkan data harga diperoleh dari BPS Kabupaten Ponorogo.

Nilai tambah bruto atas dasar harga yang berlaku diperoleh dengan cara pendekatan produksi yaitu mengalikan terlebih dahulu setiap jenis kuantum produksi dengan masing-masing harganya, kemudian hasilnya dikurangi dengan biaya antara atas dasar harga yang berlaku pada setiap tahun. Biaya antara tersebut diperoleh dengan menggunakan rasio biaya antara terhadap output hasil survei SKPR.

Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan produksi pada masing-masing tahun dengan harga pada tahun 2000, kemudian dikurangkan dengan biaya antara atas dasar harga konstan 2000.

3.1.2 TANAMAN PERKEBUNAN

Komoditi yang dicakup adalah hasil tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat seperti cengkeh, kelapa, kopi, kapok randu, tebu, tembakau, janggolan dan sebagainya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan cara pendekatan produksi, yaitu dengan mengalikan terlebih dahulu setiap jenis kuantum produksi dengan masing-masing harganya, kemudian hasilnya dikurangi

dengan biaya antara atas dasar harga berlaku pada setiap tahun. Biaya antara tersebut diperoleh dengan menggunakan rasio biaya antara terhadap output hasil survei khusus pendapatan regional.

Nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara revaluasi, sama dengan yang dilakukan pada tanaman bahan makanan.

3.1.3 PETERNAKAN

Subsektor ini mencakup produksi ternak besar, ternak kecil, unggas maupun hasil ternak seperti sapi, kambing, domba, susu segar, ayam, telur serta hasil pematangan ternak. Produksi ternak diperkirakan sama dengan jumlah ternak yang dipotong, ditambah perubahan stok populasi dan ekspor ternak neto. Data jumlah ternak yang dipotong, populasi ternak, produksi susu dan telur serta banyaknya ternak yang keluar masuk wilayah Kabupaten Ponorogo dan harga diperoleh dari data Dinas Pertanian Bidang Peternakan dan Perikanan.

Nilai tambah atas dasar harga berlaku dihitung dengan cara pendekatan produksi, yaitu mengalikan terlebih dahulu kuantum produksi setiap jenis ternak dengan harganya, kemudian dikurangi biaya antara masing-masing komoditi diperoleh dari SKPR.

Sedangkan untuk memperoleh nilai tambah atas dasar harga konstan 2000, menggunakan cara revaluasi yang dikurangi dengan rasio biaya antara berdasarkan hasil SKPR.

3.1.4. KEHUTANAN

Subsektor kehutanan mencakup penebangan kayu, pengambilan hasil hutan lainnya. Kegiatan penebangan kayu menghasilkan kayu , kayu bakar, arang dan lain-lain. Sedangkan hasil hutan produktif antara lain berupa getah pinus.

Nilai tambah atas dasar harga berlaku dihitung dengan cara mengalikan produksi dengan harga masing-masing tahun. Sedang nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan produksi dengan harga pada tahun 2000, kemudian dikurangi dengan rasio nilai tambah terhadap output. Data produksi diperoleh dari Dinas Pertanian Bidang Kehutanan dan harga diperoleh dari Perum Perhutani KPH Lawu.

3.1.5 PERIKANAN

Komoditi yang dicakup adalah semua hasil dari kegiatan perikanan air tawar atau perikanan darat. Perikanan ini mencakup ikan lele, tawes, mujair dan lain-lainnya. Data mengenai produksi dan nilai produksi diperoleh dari laporan Dinas Pertanian Bidang Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo.

Penghitungan nilai tambah bruto dilakukan dengan mengalikan rasio nilai tambah bruto terhadap output. Rasio nilai tambah itu diperoleh dari survei khusus pendapatan regional.

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan dilakukan dengan cara revaluasi.

3.2 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Komoditi yang dicakup dalam sektor ini adalah segala jenis hasil penggalian seperti pasir, batu dan tanah liat. Data produksi dan harga diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ponorogo.

Output penggalian merupakan perkalian antara produksi dengan harga masing-masing, yang apabila dikurangi dengan biaya antara akan diperoleh nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku, sedangkan nilai tambah bruto penggalian atas dasar harga konstan adalah output penggalian dikurangi dengan biaya antara atas dasar harga konstan 2000, atau menggunakan cara revaluasi.

3.3 SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Sektor ini mencakup industri besar/średang, industri kecil dan kerajinan rumahtangga. Pengelompokan ini berdasarkan jumlah tenaga kerja, yaitu :

- Industri Besar : 100 orang atau lebih
- Industri Sedang : 20 - 99 orang
- Industri Kecil : 5 - 19 orang
- Industri Kerajinan Rumahtangga : 1 - 4 orang

3.3.1 INDUSTRI BESAR SEDANG

Ruang lingkup dan metode penghitungan nilai tambah bruto industri besar dan sedang berdasarkan hasil survei industri besar/średang tahunan dari BPS Kabupaten Ponorogo.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan dihitung dengan cara

ekstrapolasi, dimana indeks produksi triwulanan barang-barang industri digunakan sebagai ekstrapolator.

3.3.2 INDUSTRI KECIL DAN KERAJINAN RUMAHTANGGA

Angka-angka output dan nilai tambah subsektor industri kecil dan kerajinan rumahtangga diperoleh dengan cara pendekatan produksi yaitu dengan mengalikan rata-rata output per tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di subsektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Sedangkan nilai tambah diperoleh dengan cara mengalikan persentase nilai tambah terhadap output berdasarkan Survei Khusus Pendapatan Regional. Penghitungan atas dasar harga konstan 2000 dengan cara revaluasi.

3.4 SEKTOR LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH

3.4.1 LISTRIK

Subsektor ini mencakup semua kegiatan kelistrikan, baik yang diusahakan oleh perusahaan listrik negara maupun non PLN. data produksi, harga dan biaya antara subsektor ini diperoleh dari PT. PLN Unit Pelayanan Ponorogo dan Balong. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian produksi dengan harga yang berlaku pada masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan 2000, diperoleh dengan cara revaluasi.

3.4.2 AIR BERSIH

Subsektor ini mencakup air bersih yang diusahakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ponorogo. Data Produksi, harga dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan air bersih diperoleh dari laporan PDAM Kabupaten Ponorogo. Perhitungan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara revaluasi.

3.5 SEKTOR KONSTRUKSI

Sektor konstruksi mencakup semua kegiatan pembangunan fisik konstruksi, baik berupa gedung, jalan, jembatan, irigasi, maupun jaringan listrik, air, telepon dan sebagainya. Nilai tambah bruto dihitung dengan menggunakan pendekatan produksi. Output diperoleh dari penjumlahan nilai pembangunan prasarana fisik yang dibiayai dari APBD Kabupaten dan Propinsi serta pembangunan pusat yang dibiayai dari APBN serta perbaikannya, pembangunan-pembangunan yang dilakukan *Developer*, sedangkan persentase nilai tambah diperoleh dari survei khusus.

3.6 SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL, DAN RESTORAN

Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) meliputi Subsektor Perdagangan, Subsektor Hotel, dan Subsektor Restoran.

3.6.1 PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

Perhitungan nilai tambah subsektor perdagangan dilakukan dengan pendekatan arus barang (*commodity flow*) yaitu dengan menghitung besarnya nilai komoditi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri serta komoditi yang diperdagangkan. Dari nilai komoditi yang diperdagangkan, diturunkan nilai margin yang merupakan output perdagangan yang selanjutnya dipakai untuk menghitung nilai tambahnya. Rasio besarnya barang-barang yang diperdagangkan, margin perdagangan dan persentase nilai tambah didasarkan pada survei khusus.

Nilai Produksi bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan mengalikan rasio-rasio di atas dengan output atas dasar harga konstan 2000 dari sektor-sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri. Nilai tambah atas dasar harga berlaku dan konstan 2000 dihitung berdasarkan perkalian antara rasio nilai tambah dengan outputnya.

3.6.2 HOTEL

Subsektor ini mencakup semua hotel baik berbintang maupun tidak berbintang serta berbagai jenis penginapan lainnya. Output dihitung dengan cara mengalikan jumlah malam tamu dan tarifnya, dalam hal ini malam tamu dianggap sebagai kuantum dari output, sedangkan persentase nilai tambah diperoleh dari Survei Khusus Pendapatan Regional.

Nilai tambah atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000 dihitung berdasarkan perkalian antara persentase nilai tambah dengan outputnya.

3.6.3 RESTORAN

Karena belum tersedianya data restoran/rumah makan secara lengkap maka output dari subsektor ini diperoleh dari perkalian antara jumlah tenaga kerja yang bekerja di restoran dengan output per tenaga kerja dari hasil survei khusus pendapatan regional. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara deflasi, menggunakan indeks harga konsumen makanan jadi dan minuman sebagai deflator.

3.7 SEKTOR PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

Sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan umum untuk barang dan penumpang, baik melalui darat, laut, sungai, danau dan udara, termasuk jasa penunjang angkutan dan komunikasi.

3.7.1 ANGKUTAN

3.7.1.1 ANGKUTAN JALAN RAYA

Subsektor ini meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, baik bermotor maupun tidak bermotor seperti : bus, truk, angkodes, becak, dokar dan sebagainya. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dengan menggunakan pendekatan produksi yang didasarkan pada data jumlah armada angkutan umum barang dan penumpang wajib uji yang diperoleh dari laporan tahunan Dinas Perhubungan (DLLAJ) dan hasil survei khusus pendapatan regional angkutan yang dilakukan setiap tahun, sedangkan untuk kendaraan tidak bermotor diperoleh dari berbagai

survei. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara revaluasi.

3.7.1.2 JASA PENUNJANG ANGKUTAN

Meliputi kegiatan pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang dan berkaitan dengan kegiatan pengangkutan seperti terminal dan parkir, keagenan barang dan penumpang, ekspedisi, bongkar muat, penyimpanan dan pergudangan serta jasa penunjang lainnya.

3.7.1.2.1 TERMINAL DAN PERPARKIRAN

Mencakup kegiatan pemberian pelayanan dan pengaturan lalu lintas kendaraan/armada yang membongkar atau mengisi muatan, baik barang maupun penumpang, seperti kegiatan terminal dan parkir. Sedangkan untuk kegiatan perparkiran masih menggunakan persentase dari angkutan darat.

3.7.1.2.2 KEAGENAN

Kegiatan keagenan mencakup pelayanan keagenan barang dan penumpang yang diberikan kepada usaha angkutan, baik angkutan darat, udara, sungai maupun laut. Output dihitung dengan menggunakan rasio yang diperoleh dari Tabel Input Output Indonesia 2000 terhadap nilai output seluruh jenis angkutan. Struktur biaya diperoleh dari SKPR.

Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara deflasi memakai indeks harga konsumen komponen biaya transport.

3.7.2 KOMUNIKASI

Kegiatan yang dicakup adalah jasa pos, giro dan telekomunikasi dan jasa penunjang komunikasi.

3.7.2.1 POS DAN GIRO

Meliputi kegiatan pemberian jasa pos dan giro seperti pengiriman surat, wesel, paket, jasa giro, jasa tabungan dan sebagainya.

Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku didasarkan pada data produksi dan struktur biaya yang diperoleh dari Laporan Keuangan PT Pos Indonesia Kantor Cabang Ponorogo. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara revaluasi.

3.7.2.2 TELEKOMUNIKASI

Mencakup kegiatan pemberian jasa dalam hal pemakaian hubungan telepon, telegrap, dan teleks. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan data yang bersumber dari Laporan Tahunan PT Telkom Indonesia Kantor Cabang Ponorogo dan Perusahaan Telekomunikasi swasta.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan menggunakan revaluasi.

3.7.2.3 JASA PENUNJANG KOMUNIKASI

Kegiatan subsektor ini mencakup pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang kegiatan komunikasi seperti wartel, warpostel, radio pager dan telepon seluler.

3.8 SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN

Sektor ini meliputi kegiatan perbankan, lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan.

3.8.1 B A N K

Dalam PDRB seri terbaru ini, nilai tambah bruto yang ditimbulkan dari kegiatan Bank Indonesia (BI) tidak mencakup pembayaran bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan pinjaman dari luar negeri, karena hal itu merupakan kebijaksanaan moneter yang bukan merupakan kegiatan komersil perbankan, sedangkan PDRB seri lama masih mencakup kedua jenis bunga tersebut.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara ekstrapolasi dengan indeks kredit riil, sebagai deflatornya Indeks Harga Konsumen (IHK) komponen umum.

3.8.2 LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

Kegiatan lembaga keuangan bukan bank meliputi kegiatan asuransi, koperasi, yayasan dana pensiun dan pegadaian.

Perhitungan output dan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara pendekatan produksi. Output diperoleh dari perkalian indikator produksi dengan indikator harga, sedangkan nilai tambah bruto diperoleh dengan cara mengurangkan nilai biaya antara dari nilai output. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara revaluasi, dan pada kegiatan yayasan dana pensiun dengan cara deflasi.

3.8.3 JASA PENUNJANG KEUANGAN

Kegiatan jasa penjuang keuangan meliputi berbagai kegiatan ekonomi antara lain: Perdagangan Valuta Asing, Anjak Piutang, Modal Ventura dan lain sebagainya.

Perhitungan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku di dasarkan pada data-data dari survei khusus. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara deflasi dan sebagai deflator adalah indeks harga konsumen komponen umum.

3.8.4 SEWA BANGUNAN

Sub sektor ini mencakup semua kegiatan jasa atas penggunaan bangunan baik digunakan sebagai tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal tanpa memperhatikan apakah rumah itu milik sendiri atau rumah yang disewa. Perkiraan nilai tambah bruto sewa bangunan untuk tempat tinggal tahun 2011 didasarkan pada data pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2011, khususnya pengeluaran untuk sewa rumah yang di inflate. Sedangkan untuk bangunan bukan tempat tinggal nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku berasal dari besarnya sewa bangunan yang dibayarkan. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara revaluasi.

3.8.5 JASA PERUSAHAAN

Subsektor ini meliputi jasa pengacara, jasa akuntan, jasa periklanan, jasa pengiriman tenaga kerja TKI/ TKW dan sebagainya.

Output atas dasar harga berlaku dapat diperoleh dengan pendekatan produksi, yaitu perkalian antara indikator produksi (jumlah tenaga kerja atau jumlah perusahaan) dengan indikator harga (rata-rata output per tenaga kerja atau rata-rata output per perusahaan). Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dapat dihitung dengan cara ekstrapolasi atau deflasi dengan menggunakan jumlah tenaga kerja atau jumlah perusahaan sebagai ekstrapolatornya atau IHK komponen terkait sebagai deflator.

Jumlah tenaga kerja atau jumlah perusahaan dapat diperkirakan berdasarkan dari hasil Sensus Ekonomi 1996 dan Sensus Penduduk 2000. Sedangkan rata-rata output per tenaga kerja, rata-rata output per perusahaan dan rasio nilai tambah dapat diperoleh dari SKPR.

3.9 SEKTOR JASA - JASA

Sektor ini meliputi Subsektor Jasa Pemerintahan Umum, Subsektor Jasa Sosial Kemasyarakatan, Subsektor Jasa Hiburan dan Kebudayaan, dan Subsektor Jasa Perseorangan.

3.9.1 JASA PEMERINTAHAN UMUM

Nilai tambah bruto subsektor jasa pemerintahan umum terdiri dari upah dan gaji rutin pegawai pemerintah pusat dan daerah. Upah dan gaji yang dihitung mencakup upah/gaji dan belanja rutin dan sebagian dari belanja pembangunan. Perkiraan penyusutan adalah sebesar 5 persen dari total upah dan gaji yang telah dihitung. Data diperoleh dari realisasi pengeluaran pemerintah pusat yang

diperoleh dari dinas vertikal yang berada di Kabupaten Ponorogo, sedangkan data Pemerintah Kabupaten diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi menggunakan indeks jumlah pegawai negeri.

3.9.2 JASA SOSIAL KEMASYARAKATAN

Subsektor ini mencakup jasa pendidikan, jasa kesehatan serta jasa kemasyarakatan lainnya seperti jasa penelitian, jasa palang merah, panti asuhan, panti wredha, yayasan pemeliharaan anak cacat, rumah ibadat, dan sebagainya, terbatas yang dikelola oleh swasta saja. Kegiatan-kegiatan sejenis yang dikelola oleh pemerintah termasuk dalam sektor pemerintahan.

3.9.2.1 JASA PENDIDIKAN

Data yang digunakan untuk memperkirakan nilai tambah bruto subsektor jasa pendidikan adalah jumlah murid sekolah swasta menurut jenjang pendidikan, yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ponorogo dan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.

Data output per murid dan persentase nilai tambah diperoleh dari kegiatan survei khusus. Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara revaluasi.

3.9.2.2 JASA KESEHATAN

Mencakup jasa rumah sakit, dokter praktek dan jasa kesehatan lainnya yang dikelola oleh swasta. Perkiraan output untuk masing-masing kegiatan didasarkan pada hasil perkalian antara rata-rata output per tempat tidur rumah sakit dengan jumlah tempat tidur rumah sakit, rata-rata output per dokter dengan jumlah dokter praktek, rata-rata output per bidan dengan jumlah bidan praktek dan rata-rata output per dukun bayi dengan jumlah dukun bayi praktek.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku didasarkan pada persentase nilai tambah terhadap output. Data yang digunakan bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo serta dari survei khusus pendapatan regional. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara revaluasi masing-masing kegiatan.

3.9.2.3 JASA SOSIAL KEMASYARAKATAN LAINNYA

Dari hasil survei khusus mengenai panti asuhan dan panti sosial lainnya, diperoleh rata-rata output per anak yang diasuh dan rata-rata output per orang yang dilayani sekaligus struktur inputnya. Kemudian dengan mengalikan jumlah anak yang diasuh dan orang yang dilayani dengan rata-rata outputnya, diperoleh perkiraan output kegiatan jasa sosial dan kemasyarakatan lainnya. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara revaluasi.

Perhitungan untuk kegiatan kursus menggunakan data hasil Susenas mengenai pengeluaran per kapita untuk biaya kursus. Perhitungan nilai tambah atas dasar harga konstan adalah dengan cara revaluasi yang rasionya didasarkan

pada survei SKPR.

Sedangkan untuk perhitungan rata-rata input tempat/rumah ibadah diperoleh dari survei khusus, dengan mengalikan jumlah tempat/rumah ibadah yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Untuk penghitungan atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara revaluasi.

3.9.3 JASA HIBURAN DAN KEBUDAYAAN

Subsektor ini mencakup tempat karaoke, billyard, panggung kesenian, studio radio swasta, taman hiburan, dan sebagainya. Data pajak tempat hiburan dan keramaian umum dan struktur biayanya, serta persentase pemungutan pajak terhadap tempat-tempat hiburan hasil survei khusus dipakai untuk memperkirakan output dan nilai tambah jasa hiburan dan kebudayaan. Penghitungan atas dasar harga konstan 2000 adalah dengan cara deflasi menggunakan IHK kelompok aneka barang dan jasa.

Untuk kegiatan studio radio swasta perkiraan nilai tambahnya didasarkan kepada rata-rata output per radio swasta dengan jumlah radio serta datanya diperoleh dari kegiatan survei khusus. Penghitungan atas dasar harga konstan adalah dengan cara revaluasi.

3.9.4 JASA PERORANGAN DAN RUMAHTANGGA

Subsektor ini mencakup jasa perbengkelan, reparasi, jasa perorangan dan pembantu rumahtangga. Data tentang rata-rata output per tenaga kerja dan struktur inputnya diperoleh dari SKPR.

Nilai output diperkirakan dengan cara mengalikan jumlah tenaga kerja yang didasarkan pada hasil Sensus Penduduk 2010 yang telah diproyeksi dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan untuk memperoleh nilai tambah bruto adalah dengan cara mengalikan persentase nilai tambah bruto, yang datanya diperoleh dari SKPR, dengan perkiraan nilai output. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan revaluasi.

<https://ponorogokab.bps.go.id>
<http://ponorogokab.bps.go.id>



IV

**TINJAUAN EKONOMI
KABUPATEN PONOROGO**

IV. TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN PONOROGO

Kinerja perekonomian Kabupaten Ponorogo dapat digambarkan dari perolehan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2013 ini perekonomian Kabupaten Ponorogo menunjukkan kinerja yang melemah dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dipengaruhi oleh menurunnya kinerja di sektor pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi Kabupaten Ponorogo selain sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dinamika ekonomi yang terjadi memberikan gambaran bahwa ekonomi tahun 2013 masih tumbuh sebesar 5,67 persen, melambat 0,85 poin dibanding tahun 2012 yang mencapai 6,52 persen.

Selain pertumbuhan, proses pembangunan ekonomi juga akan membawa dengan sendirinya suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Dari sisi permintaan agregat, perubahan struktur ekonomi terjadi terutama didorong oleh peningkatan pendapatan yang pada gilirannya membawa perubahan selera masyarakat yang terefleksi dalam perubahan pola konsumsinya. Sedangkan dari sisi penawaran agregat, faktor pendorong utama adalah perubahan atau kemajuan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) sehingga ada suatu korelasi positif antara pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, paling tidak dalam periode jangka panjang. Pertumbuhan yang berkesinambungan membawa perubahan struktur ekonomi lewat efek dari sisi permintaan (peningkatan pendapatan masyarakat) dan pada gilirannya perubahan tersebut menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut, yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan, maka sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah harus dibarengi dengan mendorong dan memacu kemajuan baik di pedesaan maupun perkotaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Ponorogo berada pada angka 3,28 persen dari total angkatan kerja pada tahun 2013, sedikit meningkat dibanding tahun 2012 yang berkisar pada angka 3,26 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi ternyata berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Ponorogo meski besarnya tidak terlalu signifikan. Walaupun kegiatan ekonomi di sektor pertanian melambat akibat kondisi iklim dan serangan hama penyakit, namun masih tingginya pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran juga sektor bangunan yang banyak membutuhkan tenaga kerja berpengaruh signifikan dalam mempertahankan angka pengangguran pada kisaran 3 persen.

Secara ekonomi, tingginya angka pengangguran akan mengurangi peluang dalam peningkatan produktivitas regional, sementara secara parsial tingginya

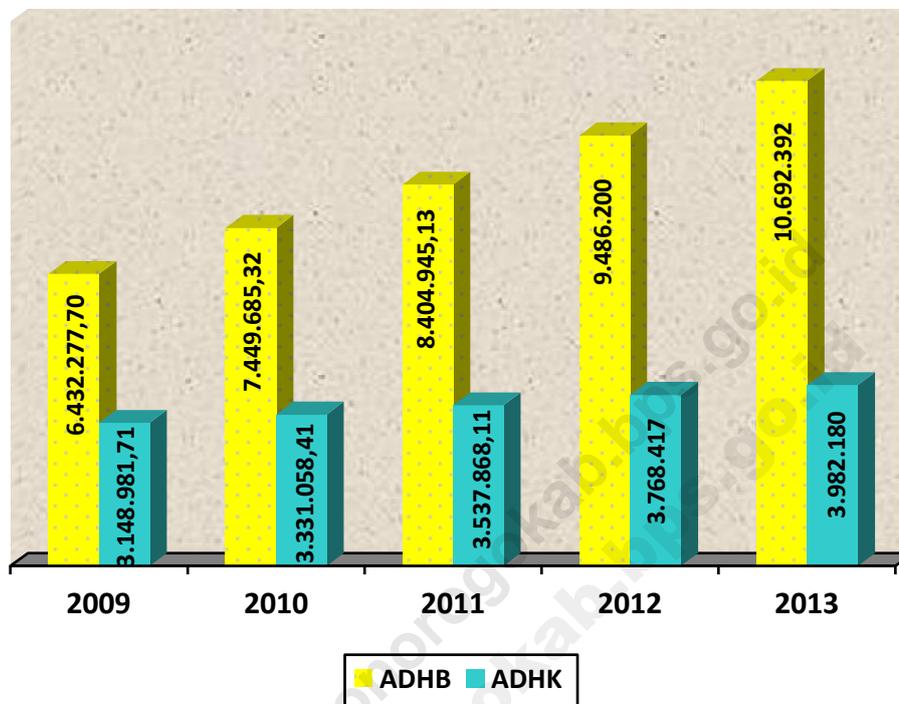
angka pengangguran akan semakin menjadi beban bagi masyarakat.

Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi juga menurun. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi tidak akan terpacu.

4.1 GAMBARAN UMUM

Struktur ekonomi Kabupaten Ponorogo selama lima tahun terakhir menunjukkan kondisi yang cukup dinamis. Perkembangan peranan sektor primer utamanya sektor pertanian kontribusinya cenderung terus menurun. Padahal sektor pertanian memegang peranan penting dalam menciptakan besarnya nilai PDRB di Kabupaten Ponorogo. Sementara tingkat produktifitasnya sangat tergantung pada ketersediaan lahan dan daya dukung sumber daya alam. Padahal lahan pertanian semakin lama semakin berkurang akibat adanya alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman dan lainnya serta daya dukung sumber daya alam sangat terbatas dan kemampuannya semakin menurun. Oleh karena itu peningkatan perekonomian rakyat yang berbasis agro dan menguatkan sistem ketahanan pangan perlu lebih ditingkatkan guna meningkatkan investasi dan permodalan agrobisnis di wilayah Kabupaten Ponorogo. Intensifikasi maupun diversifikasi pertanian disertai bimbingan dan penyuluhan terhadap petani perlu menjadi skala prioritas agar kinerja sektor ini dapat membaik.

Gambar 4.1
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2009 – 2013
(000.000 Rp.)



Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

Pergerakan ekonomi tampak dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ponorogo. Tercatat sejak tahun 2009 PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)¹ mencapai masing-masing Rp. 6.432.277,70 juta (2009); Rp. 7.449.685,32 juta (2010); Rp. 8.404.945,13 juta (2011); Rp. 9.486.200,08 juta (2012) dan Rp. 10.692.392,15 juta (2013).

Demikian pula jika ditinjau atas dasar harga konstan tahun 2000 (ADHK)², PDRB Kabupaten Ponorogo meningkat masing-masing Rp. 3.148.981,71 juta

¹ Besaran nominal PDRB biasanya disajikan atas dasar harga berlaku (ADHB), termasuk untuk penyajian besaran PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita. PDRB yang sering ditampilkan ini selalu ADHB.

² Berbeda dengan ADHB, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dihitung untuk mengetahui pertumbuhan riil hasil produksi yang sudah tidak dipengaruhi oleh perkembangan harga. Dari hasil olahan PDRB ADHB dan ADHK itu, akan didapat inflasi dari sisi produsen. Sejak tahun 2000, tahun yang menjadi tahun dasar penghitungan PDRB adalah tahun 2000, menggantikan tahun 1993 yang sudah dianggap usang.

(2009); Rp. 3.331.058,41 juta (2010); Rp. 3.537.868,11 juta (2011); Rp.3.768.417,45 juta (2012) dan Rp. 3.982.180,05 juta (2013).

Sektor Pertanian dan Sektor Perdagangan, Hotel, Restoran (PHR) masih memberikan sumbangan terbesar pada PDRB Kabupaten Ponorogo tahun 2013 masing-masing sebesar Rp. 3.473.423,20 juta dan Rp. 3.309.110,55 juta atau mempunyai peranan sebesar 32,48 persen dan 30,95 persen.

Hal yang perlu dikaji bahwa dari tahun ke tahun PDRB untuk sektor pertanian peranannya semakin menurun. Ini menunjukkan bahwa Sektor Pertanian di Kabupaten Ponorogo perlu mendapatkan penanganan dan pengelolaan sumber daya alam yang selaras dengan perkembangan teknologi guna meningkatkan produktivitas pertanian. Pada tabel pokok dapat dilihat bahwa selama tahun 2013 sektor pertanian hanya tumbuh sebesar 0,39 persen. Produktivitas di sektor ini kembali memburuk setelah tahun sebelumnya sempat membaik. Hal ini terutama disebabkan oleh merosotnya produksi tanaman bahan makanan akibat serangan hama maupun perubahan iklim yang membuat produksi menurun.

Kabupaten Ponorogo terkenal sebagai daerah pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang cukup besar di Jawa Timur. Meski nilai remitansi TKI pada tahun 2013 sebesar 214,706 milyar rupiah menurun 6,73 persen dibanding tahun 2012 yang mencapai 230,195 milyar rupiah namun dana ini juga turut menggerakkan pertumbuhan berbagai sektor seperti PHR, bangunan, angkutan dan komunikasi serta keuangan.

Sektor bangunan yang masih tumbuh tinggi pada tahun 2013 yaitu sekitar

8,7 persen juga turut menggerakkan pertumbuhan di sektor lain seperti perdagangan, pengangkutan dan juga keuangan.

Dari pergerakan ekonomi di seluruh lini sektor ekonomi, pada tahun 2013 ekonomi Kabupaten Ponorogo tumbuh sebesar 5,67 persen, melambat dibanding dengan tahun sebelumnya yang berada pada angka 6,52 persen. Di lihat dari sisi pertumbuhan sektoral, sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,2 persen. Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Ponorogo utamanya di daerah perkotaan membuat konsumsi barang kebutuhan sekunder maupun tersier semakin meningkat pula yang membawa dampak pada tumbuhnya sektor angkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, jasa persewaan dan jasa perusahaan.

Secara detail perkembangan sektor-sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ponorogo tahun 2013 akan dijelaskan pada bagian mengenai angka-angka sektoral.

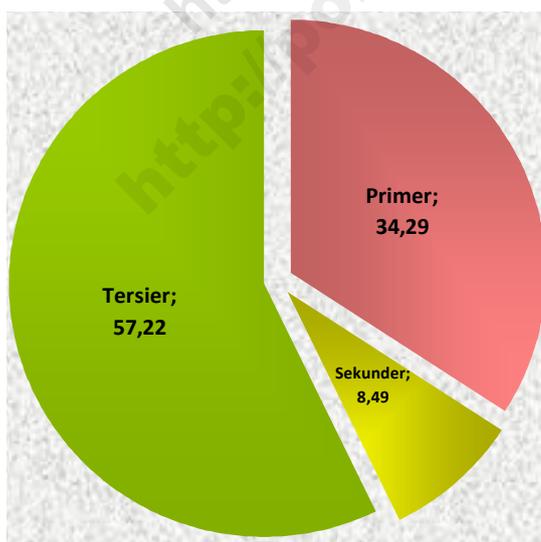
4.2 STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN PONOROGO

Dengan mengamati struktur ekonomi dari tahun ke tahun akan terlihat pola dan perkembangan kegiatan pembangunan yang dilakukan baik secara umum maupun secara lintas sektoral.

Untuk mengetahui perkembangan struktur ekonomi dari peranan tiga sektor pendukung PDRB yang dibedakan seperti berikut ini:

1. Sektor Primer, terdiri dari Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian;
2. Sektor Sekunder; terdiri dari Sektor Industri Pengolahan, Sektor LGA, dan Sektor Konstruksi;
3. Sektor Tersier, terdiri dari Sektor PHR, Sektor Angkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, dan sektor Jasa-jasa.

Gambar 4.2
STRUKTUR EKONOMI KAB. PONOROGO
TAHUN 2013 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

Biasanya besaran peranan PDRB dari ketiga sektor tersebut disajikan atas dasar harga berlaku (ADHB). Dengan memantau nilai ketiga sektor besar dalam suatu periode waktu tertentu, selain akan diketahui struktur ekonomi juga diketahui pergeserannya.

Tabel 4.1
STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2009 - 2013
(%)

SEKTOR/SUB SEKTOR	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Sektor Primer	38.27	37.64	36.46	35.70	34.29
1. Pertanian	36.25	35.73	34.55	33.84	32.48
2. Pertambangan & Penggalian	2.02	1.91	1.91	1.86	1.81
Sektor Sekunder	8.52	8.49	8.49	8.46	8.49
3. Industri Pengolahan	4.89	5.02	4.96	4.92	4.88
4. Listrik, Gas, & Air Bersih	1.45	1.38	1.32	1.25	1.22
5. Bangunan	2.18	2.09	2.21	2.29	2.39
Sektor Tersier	53.23	53.87	55.06	55.84	57.22
6. Perdagangan, Hotel, & Restoran	27.38	27.71	28.68	29.42	30.95
7. Angkutan & Komunikasi	4.96	5.23	5.43	5.45	5.51
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	6.84	7.24	7.38	7.51	7.67
9. Jasa-jasa	14.05	13.69	13.57	13.46	13.09

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

Peranan sektor primer di Kabupaten Ponorogo dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun. Perubahan struktur ekonomi ini biasa terjadi pada suatu proses pembangunan ekonomi jangka panjang, yaitu bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin kecil peran dari sektor primer dan semakin besar peran sektor sekunder dan tersier. Namun demikian peran sektor pertanian sebagai pemasok bahan baku bagi sektor industri dan sektor ekonomi lainnya harus tetap menjadi perhatian agar produktivitas di sektor ini dapat ditingkatkan.

Sedangkan peranan sektor sekunder, utamanya industri pengolahan dan listrik, gas dan air bersih cenderung menurun meski pada tahun 2013

menunjukkan peran meningkat. Hal ini disebabkan karena tingkat pertumbuhannya kalah cepat dibanding sektor tersier.

Sektor ketiga yang membentuk struktur ekonomi Kabupaten Ponorogo adalah sektor tersier, seperti pada Tabel 4.1, ditunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan peranan yaitu 53,23 persen (2009); 53,87 persen (2010); 55,06 persen (2011); 55,84 persen (2012) dan 57,22 persen (2013). Peningkatan peran ini utamanya didukung oleh pesatnya perkembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang berimbas pada pertumbuhan sektor tersier lainnya seperti angkutan dan keuangan. Selain itu perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat juga berperan besar didalam meningkatkan nilai tambah pada sektor tersier.

Dapat disimpulkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Ponorogo didominasi oleh sektor primer dan sektor tersier. Dan dalam perkembangannya, peranan sektor tersier semakin meningkat seiring dengan kejenuhan peranan yang terjadi pada sektor primer, sehingga dampak dari pembangunan infrastruktur di bidang pertanian belum menunjukkan percepatan akselerasi pada sektor pertanian, sehingga belum mampu menguatkan kembali peran sektor primer tersebut.

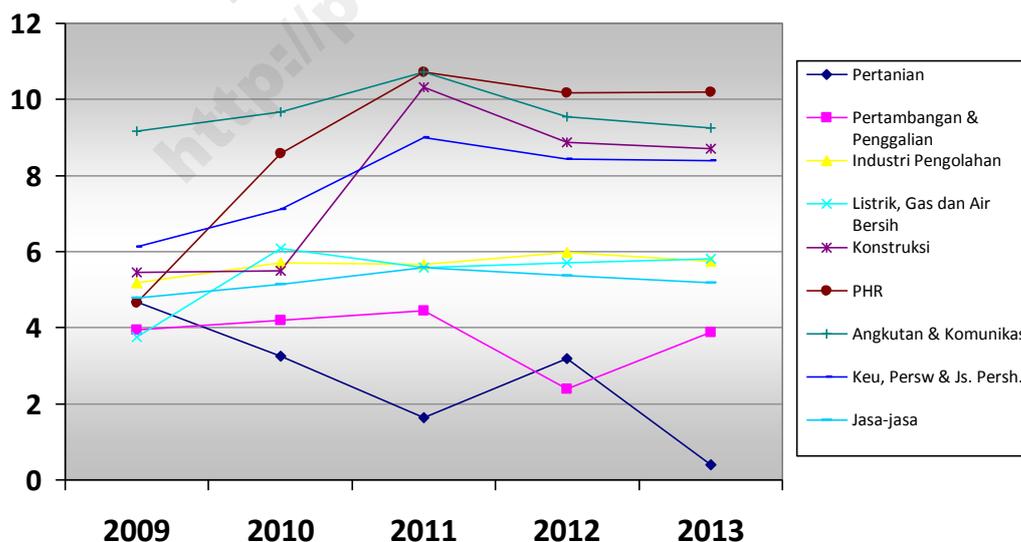
4.3 PERTUMBUHAN EKONOMI

Satu hal yang penting dalam memperbincangkan ekonomi adalah mengetahui percepatan kegiatan ekonomi suatu wilayah. Tentunya percepatan itu akan diketahui jika terdapat alat ukurnya.

Alat ukur yang dipakai untuk menghitung percepatan kegiatan ekonomi dan yang direkomendasikan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) adalah GDP (*Gross Domestic Product*), dalam hal ini adalah PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Mengapa harus PDRB ADHK? Karena yang dihitung di sini adalah “percepatan kegiatan” ekonominya, dengan maksud bahwa yang dihitung adalah pertumbuhan yang disebabkan oleh riil perubahan produksi tanpa terpengaruh oleh perubahan harga.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ketersediaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, modal, teknologi dan kewirausahaan. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh perkembangan situasi perekonomian nasional dan internasional baik yang terkait dengan kebijakan sektor riil maupun moneter serta perkembangan harga minyak dunia.

Gambar 4.3
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Th. 2009-2013 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo tahun 2013 sebesar 5,67 persen. Sektor Pertanian dan Sektor PHR yang dominan dalam pembentukan PDRB mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 0,39 persen dan 10,2 persen.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2013 disebabkan oleh menurunnya produksi pertanian khususnya subsektor tanaman bahan makanan serta tingginya inflasi dari 3,51% pada tahun 2012 menjadi 7,52% pada tahun 2013 yang cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor riil seperti pertanian, industri pengolahan, bangunan, angkutan dan jasa-jasa.

Tabel 4.2
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2009 – 2013 (%)

SEKTOR	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1. Pertanian	4,68	3,26	1,64	3.19	0.39
2. Pertambangan & Penggalian	3,95	4,20	4,45	2.40	3.88
3. Industri Pengolahan	5,18	5,71	5,66	5.98	5.74
4. Listrik, Gas, & Air Bersih	3,76	6,08	5,59	5.70	5.82
5. Bangunan	5,45	5,50	10,33	8.87	8.70
6. Perdagangan, Hotel, & Restoran	4,65	8,57	10,72	10.17	10.20
7. Angkutan & Komunikasi	9,16	9,68	10,72	9.54	9.26
8. Keuangan, Persewa. & Js. Perus.	6,13	7,11	9,00	8.43	8.40
9. Jasa-jasa	4,78	5,13	5,57	5.38	5.19

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 adalah sektor Perdagangan, Hotel & Restoran, Angkutan & Komunikasi, serta Bangunan. Namun dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali sektor Perdagangan, Hotel & Restoran kedua sektor lainnya tumbuh melambat.

Pada tahun 2013 sektor Perdagangan, Hotel & Restoran tercatat tumbuh sebesar 10,2 persen, sedikit lebih cepat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 10,17 persen. Sementara itu sektor Angkutan & Komunikasi tumbuh 9,26 persen pada tahun 2013, sedikit melambat dibandingkan tahun 2012 yang tercatat sebesar 9,54 persen. Sektor Bangunan di tahun 2013 tumbuh sebesar 8,7 persen, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh mencapai 8,87 persen.

4.4 ANGKA – ANGKA SEKTORAL

Berikut ini dijelaskan lebih mendalam tentang sektor-sektor yang membentuk PDRB Kabupaten Ponorogo beserta subsektor-subsektornya.

4.4.1 SEKTOR PERTANIAN

Tabel 4.3
PDRB SEKTOR PERTANIAN ADHB
TAHUN 2013
(000.000 Rp.)

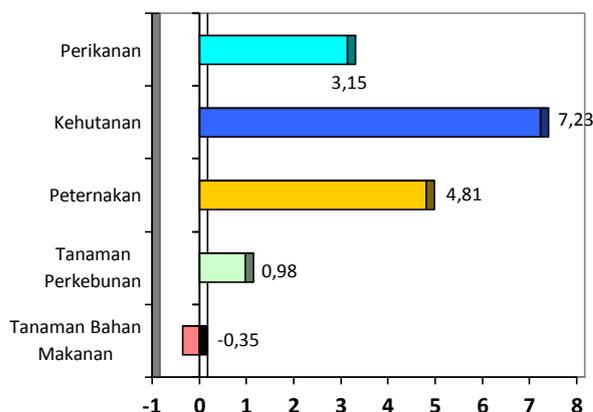
SEKTOR	ADHB
(1)	(2)
PERTANIAN	3.473.423,20
1. Tanaman Bahan Makanan	2.726.787,15
2. Tanaman Perkebunan	318.680,40
3. Peternakan	406.492,23
4. Kehutanan	4.240,98
5. Perikanan	17.222,45

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

PDRB Sektor Pertanian ADHB pada tahun 2013 sebesar Rp. 3.473,42 milyar, yang didukung oleh Subsektor Tanaman Bahan Makanan sebesar (Rp. 2.726,79 milyar), Subsektor Perkebunan (Rp. 318,68 milyar), Subsektor Peternakan (Rp. 406,49 milyar), Subsektor Kehutanan

(Rp. 4,24 milyar) dan Subsektor Perikanan (Rp. 17,22 milyar). Peranan Sektor Pertanian pada tahun 2013 sebesar 32,48 persen, dan mengalami pertumbuhan sebesar 0,39 persen, melambat dibanding tahun 2012 yang tumbuh 3,19 persen.

Gambar 4.4
PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN
TAHUN 2013



Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

Subsektor Tanaman Bahan Makanan memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Sektor Pertanian, mengingat struktur masyarakat Ponorogo yang masih agraris serta kondisi lahan yang subur. Subsektor ini mencakup komoditas tanaman padi, jagung, kacang tanah,

kacang hijau, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, sayuran dan buah-buahan. Dari berbagai komoditas tersebut produksi padi memberikan andil terbesar di sub sektor tabama, sehingga apabila terjadi perubahan produksi atau harga akan berpengaruh besar terhadap sub sektor ini. Dalam perkembangannya sub sektor tabama ini dari tahun ke tahun peranannya semakin berkurang dari 32,63 persen pada tahun 2009 menjadi 25,5 persen pada tahun 2013.

Pertumbuhan tertinggi di sektor pertanian dicapai oleh subsektor kehutanan sebesar 7,23 persen, lebih cepat dibanding tahun 2012 yang tumbuh 5,64 persen. Tingginya pertumbuhan sektor kehutanan tersebut karena meningkatnya produksi kayu-kayuan seiring masih tingginya permintaan di sektor bangunan maupun industri pengolahan.

Sementara pertumbuhan negatif dialami subsektor tanaman bahan makanan pada tahun 2013 yaitu sebesar -0,35 persen, melambat dibanding tahun 2012 yang tumbuh 2,66 persen. Pertumbuhan negatif di subsektor tanaman

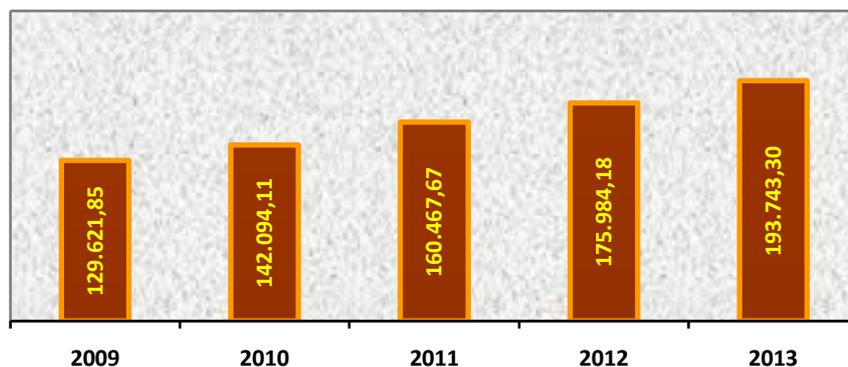
bahan makanan ini disebabkan oleh serangan hama dan faktor tingginya curah hujan yang menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak optimal. Begitu pula yang terjadi pada subsektor perkebunan yang tumbuh sebesar 0,98 persen pada tahun 2013, melambat dibanding tahun 2012 yang tercatat sebesar 5,12 persen.

Subsektor peternakan dan perikanan pada tahun 2013 juga tumbuh masing-masing sebesar 4,81 persen dan 3,15 persen, melambat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 5,25 persen dan 3,2 persen. Penurunan produksi pada beberapa jenis ternak dan hasil perikanan menyebabkan pertumbuhan subsektor ini sedikit melambat.

4.4.2. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Sektor pertambangan dan penggalian memiliki peranan penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi utamanya sektor industri pengolahan dan konstruksi. Sektor ini mencakup pertambangan migas, pertambangan non migas dan penggalian. Namun di Kabupaten Ponorogo hanya terdapat kegiatan penggalian dengan komoditi yang dominan adalah batu gamping, trass, andesit, dan tanah urug.

Gambar 4.5
PDRB SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN ADHB
TAHUN 2009-2013 (000.000 Rp.)



Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

Secara keseluruhan nilai tambah yang diciptakan atas dasar harga berlaku selama tahun 2013 sebesar Rp. 193,74 miliar atau setara 1,81 persen terhadap total nilai PDRB Kabupaten Ponorogo. Sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 3,88 persen pada tahun 2013, lebih cepat dibanding tahun 2012 sebesar 2,4 persen. Masih tingginya pertumbuhan sektor bangunan berdampak positif pada pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian.

4.4.3. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Sektor Industri Pengolahan bukan merupakan sektor unggulan untuk Kabupaten Ponorogo, meskipun sektor ini merupakan sektor strategis yang

Tabel 4.4
PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN ADHB
TAHUN 2013
(000.000 Rp.)

SEKTOR	ADHB
(1)	(2)
INDUSTRI PENGOLAHAN	522.244,92
1. Makanan, Minuman & Tembakau	261.165,77
2. Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki	61.442,98
3. Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya	42.522,03
4. Kertas & Barang Cetak	56.071,30
5. Pupuk, Kimia & Barang Dari Karet	41.408,64
6. Semen & Barang Galian Non Logam	41.291,30
7. Logam Dasar Besi & Baja	107,66
8. Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	1.846,04
9. Barang Lainnya	16.389,20

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

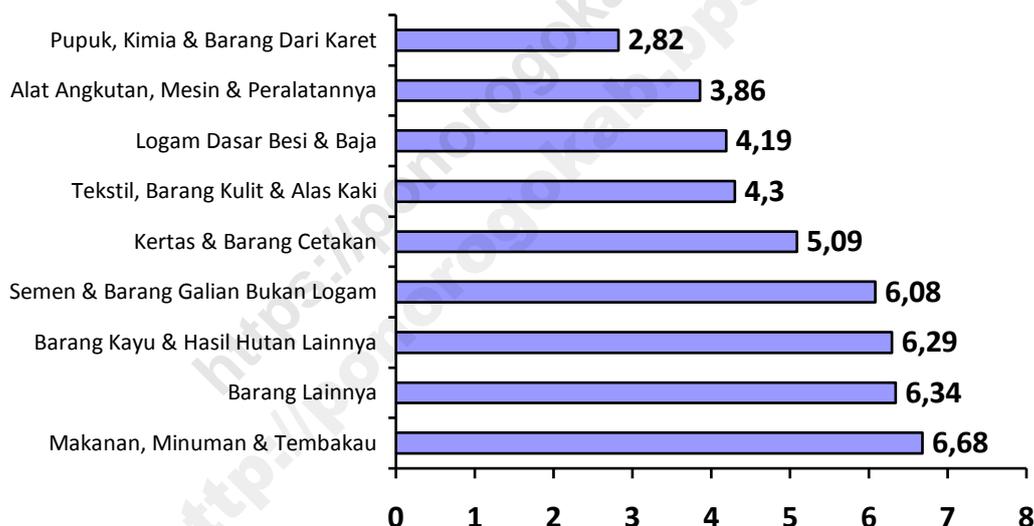
diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

Untuk sektor industri pengolahan dilihat secara umum nampak mengalami peningkatan peranan dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan perkembangan industrial (*industrial revolution*) yang menyebar dan

berpengaruh di semua regional. Pada era revolusi industri pada saat ini, pengaruh kapitalisasi dengan penggunaan modal dan aplikasi teknologi maju dapat dengan cepat dikembangkan dan secara singkat dapat merealisasikan kegiatan berproduksi secara mikro maupun industri massal.

Peranan sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian Kabupaten Ponorogo masih cukup rendah yaitu 4,88 persen dari total PDRB dengan pertumbuhan sebesar 5,74 persen, melambat dibanding tahun 2012 yang tumbuh 5,98 persen. Tingginya angka inflasi membuat biaya produksi meningkat sehingga produksi menjadi terbatas. Selain itu juga berdampak pada daya beli masyarakat yang cenderung menurun sehingga permintaan terhadap produk hasil industri juga menurun.

Gambar 4.6
PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN
TAHUN 2013
(%)



Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

Apabila dilihat peranannya, kontribusi terbesar diberikan oleh subsektor industri makanan, minuman dan tembakau mencapai 2,44 persen terhadap total nilai PDRB Kabupaten Ponorogo pada tahun 2013, meningkat dibanding tahun 2012 sebesar 2,42 persen. Sementara subsektor lain kontribusinya cenderung mengalami penurunan.

Dilihat dari sisi level pertumbuhan, diketahui bahwa semua subsektor

mengalami pertumbuhan positif, pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,68 persen, lebih cepat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 6,6 persen. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan di subsektor perdagangan, hotel dan restoran yang masih tinggi. Subsektor lain yang tumbuh lebih cepat dibanding tahun 2012 adalah subsektor barang kayu dan hasil hutan lainnya, subsektor pupuk, kimia & barang dari karet serta subsektor industri logam dasar besi dan baja. Sementara subsektor lainnya mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya.

4.4.2 SEKTOR LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH

Sektor listrik, gas dan air bersih sangat essential sebagai penunjang seluruh kegiatan ekonomi, dan sebagai infrastruktur pendorong aktivitas proses produksi sektoral serta untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pada sektor listrik, gas dan air bersih mengalami perkembangan produksi yang sejalan dengan tumbuhnya sektor produksi.

Tabel 4.5
PDRB SEKTOR
LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH ADHB
TAHUN 2013
(000.000 Rp.)

SEKTOR	ADHB
(1)	(2)
LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	129.975,49
1. Listrik	116.722,24
2. Gas	0.00
3. Air Bersih	13.253,25

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

Apabila dihitung atas dasar harga berlaku, nilai tambah sektor listrik, gas dan air bersih tahun 2013 sebesar Rp. 129,97 miliar, atau naik 9,52 persen dibanding tahun sebelumnya. Secara keseluruhan kontribusi sektor

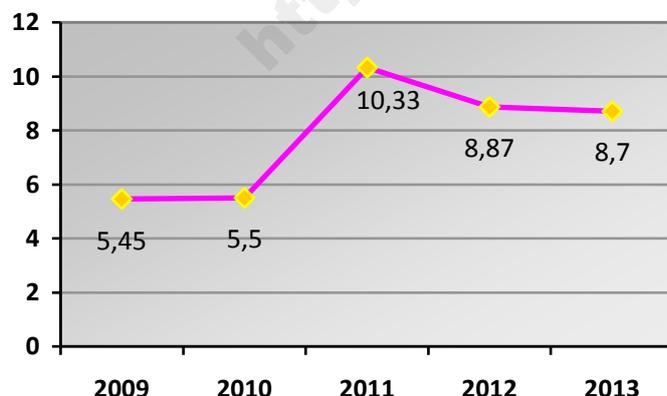
ini sebesar 1,22 persen terhadap total nilai PDRB Kabupaten Ponorogo.

Sementara bila dilihat menurut subsektor pendukungnya yaitu subsektor listrik dan subsektor air bersih, masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 6,46 persen (Listrik) dan -1,79 persen (Air Bersih). Terus menurunnya produksi air bersih yang disalurkan menyebabkan pertumbuhan minus pada subsektor air bersih.

Pertumbuhan subsektor listrik yang lebih cepat dibanding tahun 2012 sebesar 6,26 persen tidak terlepas dari pertumbuhan sektor lainnya seperti industri, bangunan, perdagangan, hotel & restoran serta sektor jasa-jasa. Semakin cepat pertumbuhan di sektor-sektor tersebut maka permintaan di subsektor listrik juga akan semakin meningkat.

4.4.3 SEKTOR BANGUNAN/KONSTRUKSI

Gambar 4.7
PERTUMBUHAN SEKTOR KONSTRUKSI
TAHUN 2009-2013
(%)



Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

Meningkatnya volume kegiatan ekonomi di Kabupaten Ponorogo tidak lepas dari peran Sektor Konstruksi. Berkembangnya kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sangat baik di Kabupaten Ponorogo menarik investor untuk melakukan investasi dalam bentuk usaha

property, seperti ruko dan properti lain yang digunakan untuk usaha. Perkembangan penduduk juga berpengaruh terhadap kebutuhan kegiatan pembangunan baik gedung perkantoran, perumahan, jalan, jembatan dan sebagainya.

Dari hasil penghitungan atas dasar harga berlaku, total nilai PDRB sektor konstruksi pada tahun 2013 sebesar Rp. 255,07 miliar atau setara 2,39 persen terhadap total nilai PDRB Kabupaten Ponorogo.

Selama lima tahun terakhir sebagaimana tampak pada Gambar 4.7 tampak bahwa pertumbuhan sektor konstruksi tiap tahun masih cukup tinggi. Secara kasat mata pembangunan properti seperti gedung perkantoran, perbaikan sarana perhubungan dan perumahan pada tahun 2013 sangat berperan dalam tumbuhnya sektor konstruksi.

4.4.4 SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL, DAN RESTORAN

Tabel 4.6
PDRB SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL
DAN RESTORAN ADHB
TAHUN 2013
(000.000 Rp.)

SEKTOR	ADHB
(1)	(2)
PERDAGANGAN, HOTEL, RESTORAN	3.309.110,55
1. Perdagangan	2.747.757,43
2. Hotel	5.233,52
3. Restoran	556.119,60

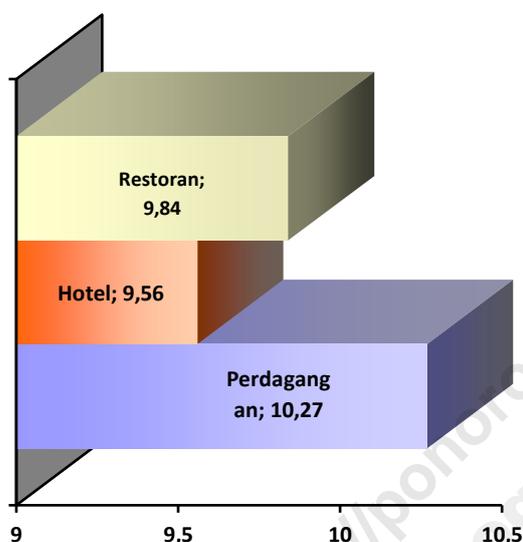
Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua setelah sektor pertanian. Berbagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi pariwisata baik wisata alam maupun budaya memberikan

peluang pada sektor Perdagangan, hotel dan restoran untuk berkembang.

PDRB atas dasar harga berlaku sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) pada tahun 2013 sebesar Rp. 3.309,11 milyar, tertinggi kedua setelah sektor pertanian.

Gambar 4.8
PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN
HOTEL DAN RESTORAN
TAHUN 2013
(%)



Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

merupakan sektor paling dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ponorogo. Dalam perkembangannya sektor perdagangan, hotel dan restoran di tahun 2013 mampu tumbuh mencapai 10,2 persen, lebih cepat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 10,17 persen.

Selama tahun 2013, sektor perdagangan, hotel dan restoran telah menunjukkan kinerja yang baik, masing-masing subsektor mengalami pertumbuhan cukup tinggi. Subsektor perdagangan tumbuh sebesar 10,27 persen, subsektor hotel tumbuh 9,56 persen dan subsektor restoran tumbuh 9,84 persen.

Peranan sektor ini mencapai 30,95 persen dengan subsektor perdagangan besar dan eceran memegang kontribusi terbesar yaitu 25,70 persen, subsektor restoran 5,2 persen dan subsektor hotel 0,05 persen. Dalam perkembangannya sektor ini tumbuh lebih cepat dibanding sektor pertanian yang

4.4.5 SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

Tabel 4.7
PDRB SEKTOR ANGKUTAN DAN
KOMUNIKASI ADHB
TAHUN 2013
(000.000 Rp.)

SEKTOR	ADHB
(1)	(2)
ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	589.193,46
a. Angkutan	390.603,00
1. Angkutan Jalan Raya	371.011,33
2. Jasa Penunjang Angkutan	19.591,67
b. Komunikasi	198.590,47
1. Pos Dan Telekomunikasi	192.422,66
2. Jasa Penunjang Komunikasi	6.167,80

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

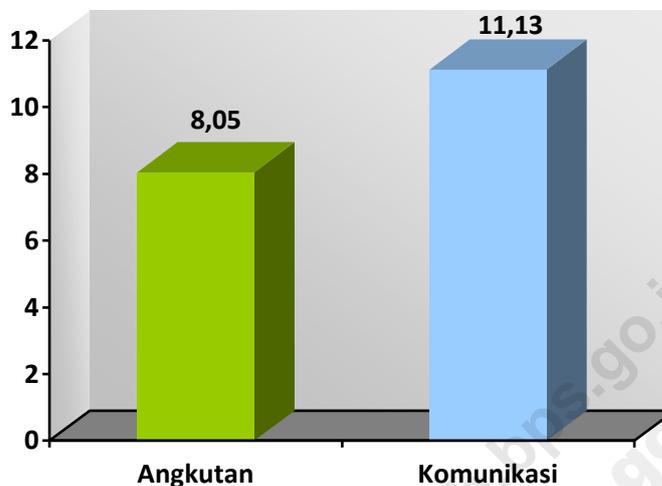
Di era globalisasi peranan sektor angkutan dan komunikasi sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, utamanya jasa telekomunikasi. Banyaknya dealer maupun usaha lembaga pembiayaan (leasing) yang memberikan kemudahan di Kabupaten Ponorogo sebagai sarana pendukung kepemilikan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat serta kemajuan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi), terutama teknologi komunikasi merupakan faktor pendorong semakin meningkatnya sektor angkutan dan komunikasi.

PDRB atas dasar harga berlaku untuk sektor angkutan dan komunikasi pada tahun 2013 sebesar Rp. 589,19 milyar atau mempunyai peranan sebesar 5,51 persen, dan mampu tumbuh sebesar 9,26 persen.

Apabila dilihat komposisinya, maka subsektor angkutan lebih besar dibanding subsektor komunikasi, masing-masing dengan kontribusi sebesar 3,65 persen dan 1,86 persen terhadap total nilai PDRB Kabupaten Ponorogo.

Di sisi lain, dari level pertumbuhan dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 pertumbuhan subsektor komunikasi mencapai 11,13 persen, lebih cepat dibanding subsektor angkutan yang tumbuh sebesar 8,05 persen.

Gambar 4.9
PERTUMBUHAN SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI
TAHUN 2013
(%)



Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

Cepatnya pertumbuhan sektor angkutan dan komunikasi, khususnya pada subsektor komunikasi didorong oleh berkembangnya perangkat telekomunikasi berbasis internet seperti Blackberry, maupun kemudahan fasilitas kartu GSM maupun CDMA dengan akses internet dan fasilitas facebook sangat mendukung pertumbuhan subsektor ini. Selain itu, pengaruh budaya modern yang sangat cepat berkembang di masyarakat, menciptakan suatu generasi yang semakin bergantung dengan alat telekomunikasi yang berbasis internet.

4.4.6 SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN

Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan merupakan sektor pendukung yang fungsinya cukup penting bagi perkembangan ekonomi di Kabupaten Ponorogo. Sektor ini meliputi subsektor bank, lembaga keuangan

bukan bank, sewa bangunan dan jasa perusahaan. Dua subsektor pertama tersebut sebagai sektor finansial karena secara umum kegiatan utama berhubungan dengan kegiatan pengelolaan keuangan berupa penarikan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat atau pelaku ekonomi.

Tabel 4.8
PDRB SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN,
DAN JASA PERUSAHAAN ADHB
TAHUN 2013
(000.000 Rp.)

SEKTOR	ADHB
(1)	(2)
KEUANGAN, PERSEWAAN & JS. PERUS.	820.375,30
1. B a n k	166.639,10
2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	144.937,10
3. Jasa Penunjang Keuangan	3.151,85
4. Sewa Bangunan	366.782,36
5. Jasa Perusahaan	138.864,89

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

Dalam kaitan dengan perkreditan dan permodalan, perbankan sangat berperan di dalamnya. Usaha jasa persewaan seperti sewa kantor, sewa counter perdagangan, sewa gedung, sewa gudang

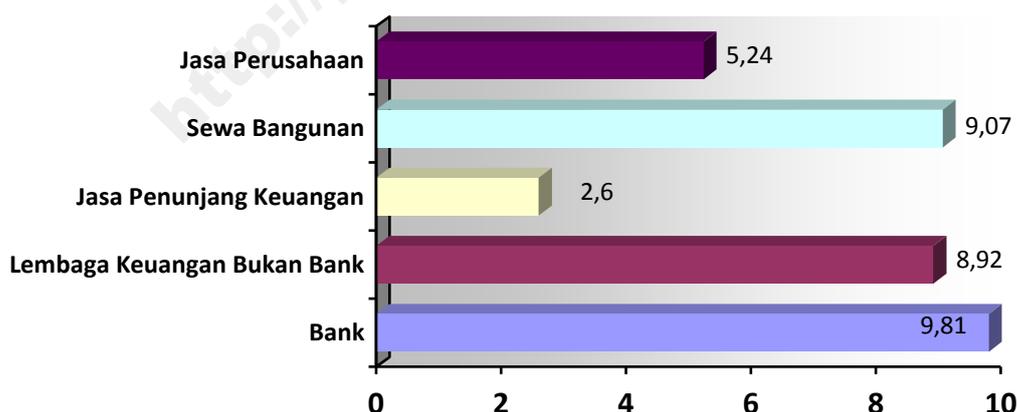
juga sangat membantu roda ekonomi. Sementara, usaha periklanan, notaris, dan konsultan melengkapi jalannya perekonomian di Kabupaten Ponorogo ini.

Dari hasil penghitungan PDRB telah diketahui bahwa nilai tambah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 sebesar Rp. 820,37 milyar dengan peranan sebesar 7,67 persen dan tumbuh sebesar 8,4 persen, sedikit melambat dibanding tahun 2012 yang tumbuh 8,43 persen. Kabupaten Ponorogo sebagai sumber pengirim tenaga kerja ke luar negeri yang cukup besar di Jawa Timur turut andil dalam berkembangnya sektor perbankan, karena remitansi TKI ini sebagian besar menggunakan jasa perbankan.

Sementara pada subsektor lembaga keuangan bukan bank seperti pegadaian, asuransi dan lembaga *leasing* juga semakin berkembang seiring tumbuhnya sektor bangunan, sektor angkutan dan komunikasi serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Nilai PDRB untuk subsektor sewa bangunan merupakan yang terbesar dibanding empat subsektor lainnya dalam pembentukan PDRB pada sektor lembaga keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Hal ini berkaitan erat dengan pesatnya pertumbuhan di sektor konstruksi. Dari tahun ke tahun peranan subsektor bank, subsektor lembaga keuangan bukan bank, subsektor jasa penunjang keuangan dan subsektor sewa bangunan cenderung meningkat, sebaliknya subsektor jasa perusahaan cenderung menurun karena pertumbuhan subsektor ini kalah cepat dibanding subsektor lainnya.

Gambar 4.10
PERTUMBUHAN SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN
TAHUN 2013
(%)



Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

4.4.7 SEKTOR JASA – JASA

Sektor terakhir yang ikut andil dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Ponorogo adalah sektor jasa-jasa yang terbagi menjadi subsektor jasa pemerintahan umum dan subsektor jasa swasta.

Tabel 4.9
PDRB SEKTOR JASA - JASA ADHB
TAHUN 2013
(000.000 Rp.)

SEKTOR	ADHB
(1)	(2)
JASA - JASA	1.399.257,31
I. Pemerintahan Umum	728.400,82
II. Swasta	670.856,49
1. Jasa Sosial Kemasyarakatan	219.983,63
2. Jasa Hiburan Dan Rekreasi	32.993,31
3. Jasa Perorangan Dan RT	417.879,55

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

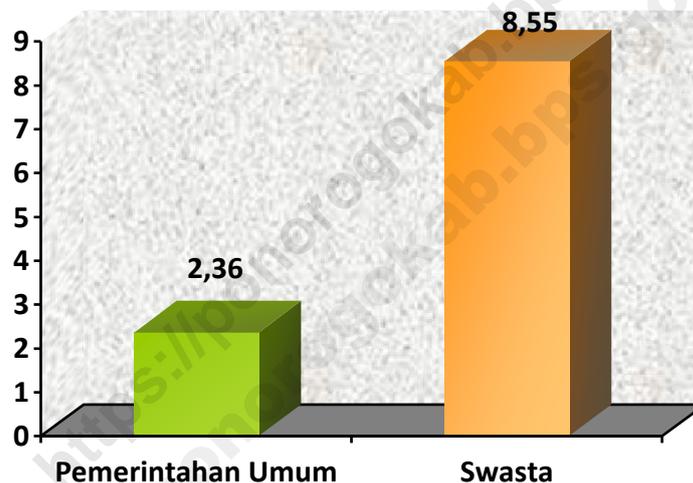
Nilai tambah yang diciptakan dari sektor jasa-jasa atas dasar harga berlaku tahun 2013 sebesar Rp. 1.399,26 milyar atau setara dengan 13,09 persen dari total nilai PDRB Kabupaten Ponorogo,

dengan komposisi subsektor pemerintahan umum sebesar 6,81 persen dan subsektor swasta sebesar 6,27 persen. Secara keseluruhan sektor jasa-jasa tumbuh sebesar 5,19 persen, melambat dibanding tahun 2012 yang tumbuh sebesar 5,38 persen.

Sementara bila dilihat masing-masing subsektornya, pertumbuhan subsektor pemerintahan umum sebesar 2,36 persen melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh mencapai 3,19 persen. Adanya pegawai yang memasuki masa purna tugas padahal tidak ada penambahan pegawai baru menyebabkan pertumbuhan di subsektor ini melambat. Sementara subsektor jasa swasta tumbuh lebih cepat yaitu 8,09 persen pada tahun 2012 menjadi 8,55 persen pada tahun 2013.

Selama lima tahun terakhir peranan subsektor jasa pemerintahan umum cenderung menurun yaitu dari 8,87 persen pada tahun 2009 menurun menjadi 6,81 persen pada tahun 2013. Sebaliknya peranan subsektor jasa swasta cenderung meningkat dari 6 persen pada tahun 2009 menjadi 6,27 persen pada tahun 2013.

Gambar 4.11
PERTUMBUHAN SEKTOR JASA – JASA
TAHUN 2013
(%)



4.5 PDRB PER KAPITA DAN PENDAPATAN REGIONAL PER KAPITA

Besaran PDRB perkapita dan pendapatan perkapita dapat dijadikan salah satu alat ukur untuk mengetahui sejauh mana nilai tambah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh tiap penduduk, mulai dari bayi yang baru lahir sampai orang yang sudah lanjut usia. Menikmati disini diartikan sebagai turut meramaikan kegiatan ekonomi, misalnya anak yang baru lahir akan

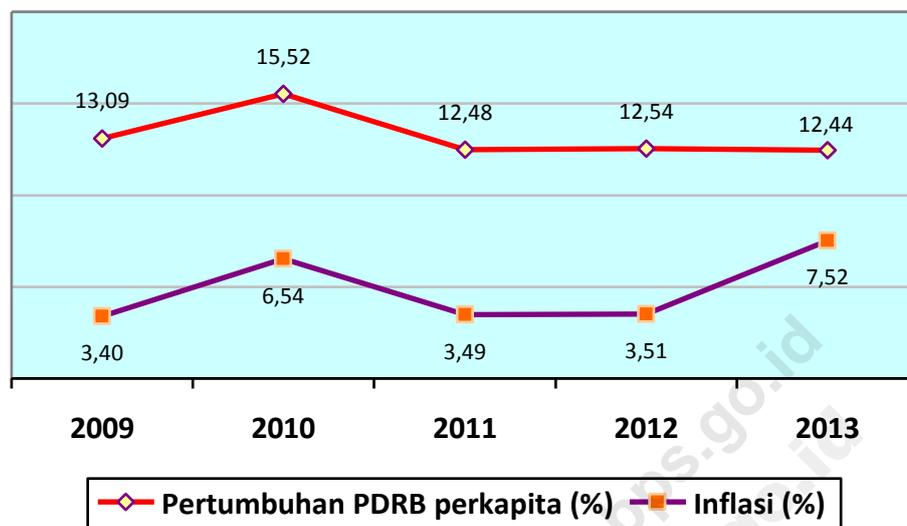
turut mempengaruhi keberadaan penyediaan jasa kesehatan saat melahirkan, industri pakaian bayi, industri makanan-minuman bayi, industri obat-obatan, dan sebagainya.

Pada umumnya indikator itu disajikan atas dasar harga berlaku (ADHB). PDRB per kapita diturunkan dari besarnya PDRB suatu wilayah yang telah dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sehingga tidak bisa menggambarkan secara riil pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk, karena dipengaruhi oleh produksi barang dan jasa. Namun demikian, PDRB perkapita masih cukup relevan untuk mengetahui apakah secara rata-rata pendapatan masyarakat mengalami peningkatan atau tidak.

Sedangkan pendapatan regional per kapita dihitung dengan menghilangkan faktor "bruto" yang terdiri dari penyusutan dan pajak tidak langsung neto, sehingga pendapatan regional perkapita dinilai lebih mendekati keadaan sebenarnya dibandingkan PDRB perkapita.

Kedua indikator tersebut besarnya dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa apabila pertumbuhan jumlah penduduk suatu wilayah lebih kecil dari pertumbuhan PDRB, maka akan semakin tinggi besaran PDRB per kapita dan Pendapatan Regional per kapita wilayah tersebut, walaupun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk, indikator ini cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu wilayah dalam skala makro, paling tidak sebagai acuan dalam melihat kemampuan suatu wilayah.

Gambar 4.12
PERTUMBUHAN PDRB PER PERKAPITA KABUPATEN PONOROGO
DAN INFLASI KOTA MADIUN TAHUN 2009-2013 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

PDRB per kapita Kabupaten Ponorogo pada tahun 2013 sebesar Rp. 12,38 juta rupiah, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,01 juta rupiah. Namun pertumbuhannya sedikit melambat dibandingkan dengan tahun 2012, tercatat pertumbuhan PDRB perkapita tahun 2012 adalah 12,54 persen sedangkan tahun 2013 sebesar 12,44 persen. Pengaruh inflasi yang cukup tinggi mencapai 7,52 persen pada tahun 2013 utamanya pada kelompok makanan dan transportasi berpengaruh terhadap menurunnya produktivitas beberapa sektor seperti industri dan perdagangan sehingga menyebabkan pertumbuhan PDRB perkapita melambat dibanding tahun sebelumnya.

4.6 TINGKAT PERKEMBANGAN HARGA

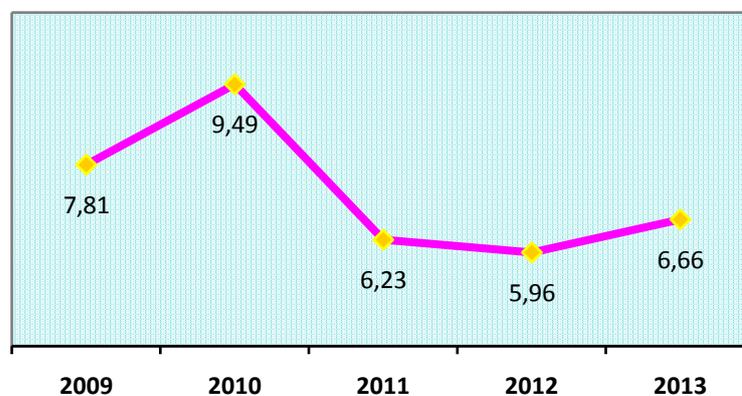
Dari hasil bagi PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, maka diperoleh indeks harga implisit. Perubahan indeks harga implisit antar tahun merupakan gambaran angka inflasi dari sisi produsen (biasa disebut

laju implisit). Umumnya laju implisit ini dimanfaatkan sebagai indikator daya elastisitas produsen dalam menghadapi isu global yang sangat rentan terhadap perubahan harga barang/jasa.

Laju implisit sedikit berbeda dengan inflasi yang diperoleh dari perubahan indeks harga konsumen (IHK) atau yang biasa dikenal sebagai inflasi. Kedua tingkat perubahan harga tersebut mempunyai perbedaan sisi pandang, laju implisit adalah perubahan harga yang dilihat dari sisi produsen dan inflasi dari sisi konsumen. Secara makro, baik laju implisit maupun inflasi keduanya merupakan indikator perubahan harga barang dan jasa yang bermanfaat untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga-harga barang/jasa dan kebijakan perekonomian lainnya.

Selama lima tahun terakhir laju implisit PDRB menunjukkan perkembangan yang fluktuatif pada kisaran 5 hingga 9,5 persen. Sedangkan pada tahun 2013 laju implisit PDRB sebesar 6,66 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 5,96 persen.

Gambar 4.13
LAJU IMPLISIT PDRB
TAHUN 2009-2013
(%)



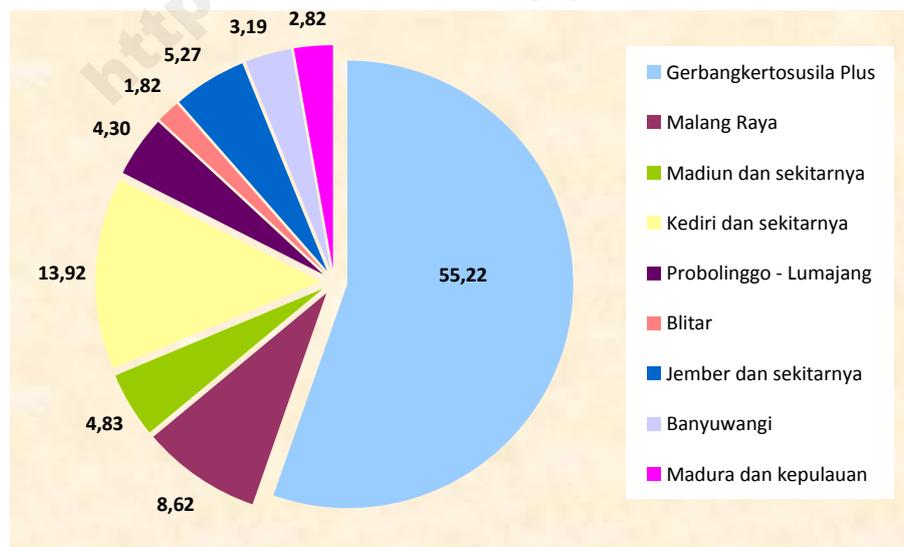
Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

4.7 PERBANDINGAN PDRB JAWA TIMUR DAN PDRB KABUPATEN/KOTA

Sebagian besar kegiatan ekonomi Jawa Timur masih berpusat di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Gerbangkertosusila Plus yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Hal ini tampak dari besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh wilayah ini, dimana pada tahun 2013 mampu menyumbang 55,22 persen dari total PDRB Jawa Timur.

Sementara untuk SWP Madiun dan sekitarnya di mana Kabupaten Ponorogo berada di dalamnya hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 4,83 persen untuk PDRB Jawa Timur atau menempati peringkat kelima dari sembilan satuan wilayah pembangunan yang ada di Jawa Timur.

Gambar 4.14
KONTRIBUSI PDRB PER SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN (SWP)
TERHADAP PDRB JAWA TIMUR
TAHUN 2013 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

Di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Madiun dan sekitarnya sendiri Kabupaten Ponorogo pada tahun 2013 menempati urutan pertama dalam besaran nilai PDRB dengan menyumbang peranan sebesar 19,9 persen dari total nilai PDRB SWP Madiun dan sekitarnya. Sementara bila dilihat dari sisi pertumbuhannya, pada tahun 2013 Kota Madiun mampu tumbuh 8,07 persen, lebih cepat dibanding rata-rata pertumbuhan SWP Madiun dan sekitarnya yang tumbuh 6,63 persen.

Tabel 4.10
PERBANDINGAN PDRB DI SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN (SWP)
MADIUN DAN SEKITARNYA
TAHUN 2013

Kabupaten/Kota	ADHB (000.000 Rp.)	Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
Kab. Pacitan	4.826.394,86	8,98	6,02
Kab. Ponorogo	10.692.392,15	19,90	5,67
Kab. Madiun	9.953.785,63	18,53	6,37
Kab. Magetan	10.598.186,96	19,72	6,67
Kab. Ngawi	10.331.392,62	19,23	6,98
Kota Madiun	7.327.602,22	13,64	8,07
SWP Madiun dan sekitarnya	53.729.754,44	100,00	6,63

The background features a large, faint watermark logo of Kabupaten Morowali. The logo is circular and composed of many small, grey squares arranged in a pattern that forms the outline of the county. Overlaid on this logo is the text 'http://www.morowal.kab.pps.go.id' in a light grey font, which is repeated twice in a circular path.

LAMPIRAN

TABEL POKOK & TABEL TURUNAN PDRB 2009-2013

**Tabel 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PONOROGO ATAS DASAR
HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009 - 2013 (JUTA RUPIAH)**

SEKTOR/SUB SEKTOR	2009	2010	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN	2.331.583,90	2.661.965,76	2.903.580,37	3.215.217,15	3.473.423,20
a. Tanaman Bahan Makanan	1.884.722,09	2.144.648,54	2.306.752,58	2.540.180,28	2.726.787,15
b. Tanaman Perkebunan	190.374,21	224.466,44	260.741,40	295.295,11	318.680,40
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	242.795,19	277.798,46	318.901,69	360.333,51	406.492,23
d. Kehutanan	2.450,02	2.770,49	3.168,23	3.704,46	4.240,98
e. Perikanan	11.242,40	12.281,84	14.016,47	15.703,78	17.222,45
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	129.621,85	142.094,11	160.467,67	175.984,18	193.743,30
a. Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Pertambangan tanpa Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Penggalian	129.621,85	142.094,11	160.467,67	175.984,18	193.743,30
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	314.311,21	373.755,34	417.086,30	466.820,55	522.244,92
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gas Alam Cair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Tanpa Migas	314.311,21	373.755,34	417.086,30	466.820,55	522.244,92
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	153.492,85	181.589,58	204.394,02	229.438,83	261.165,77
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	35.413,69	43.708,95	49.489,26	55.926,53	61.442,98
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	25.471,45	32.693,04	35.410,93	38.540,82	42.522,03
4. Kertas dan Barang Cetak	34.660,00	40.048,48	44.533,11	50.432,95	56.071,30
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	30.471,67	33.900,29	35.026,39	38.277,54	41.408,64
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	23.281,98	28.619,68	33.199,92	37.087,12	41.291,30
7. Logam Dasar Besi & Baja	82,65	89,00	96,60	100,95	107,66
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	1.199,69	1.408,31	1.543,86	1.740,96	1.846,04
9. Barang lainnya	10.237,22	11.698,01	13.392,21	15.274,86	16.389,20
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	93.300,39	102.956,98	110.568,43	118.680,46	129.975,49
a. Listrik	83.416,41	90.965,52	97.972,73	105.700,27	116.722,24
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	9.883,98	11.991,47	12.595,70	12.980,19	13.253,25
5. BANGUNAN	140.256,85	155.707,45	185.843,36	217.100,32	255.068,62
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	1.760.879,33	2.064.054,83	2.410.135,46	2.790.641,75	3.309.110,55
a. Perdagangan Besar & Eceran	1.474.955,63	1.709.283,90	1.996.971,82	2.315.224,90	2.747.757,43
b. Hotel	3.106,89	3.382,69	3.917,78	4.472,63	5.233,52
c. Restoran	282.816,81	351.388,23	409.245,86	470.944,21	556.119,60
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	318.949,84	389.974,80	451.690,20	512.566,73	589.193,46
a. Pengangkutan	219.978,30	266.524,12	306.251,43	345.002,45	390.603,00
1. Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Angkutan Jalan Raya	208.401,73	253.475,86	291.319,56	327.800,73	371.011,33
3. Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Jasa Penunjang Angkutan	11.576,57	13.048,26	14.931,88	17.201,72	19.591,67
b. Komunikasi	98.971,54	123.450,68	145.438,77	167.564,28	198.590,47
1. Pos dan Telekomunikasi	94.960,58	119.021,14	140.497,79	162.101,23	192.422,66
2. Jasa Penunjang Komunikasi	4.010,96	4.429,53	4.940,98	5.463,05	6.167,80
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	439.792,46	539.503,87	620.435,30	712.782,39	820.375,30
a. Bank	89.326,35	104.080,73	120.685,00	139.749,86	166.639,10
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	79.045,00	93.754,67	108.161,38	126.166,82	144.937,10
c. Jasa Penunjang Keuangan	1.729,14	2.303,87	2.580,69	2.922,03	3.151,85
d. Sewa Bangunan	181.750,70	236.749,33	275.513,75	318.620,19	366.782,36
e. Jasa Perusahaan	87.941,27	102.615,27	113.494,48	125.323,50	138.864,89
9. JASA-JASA	903.581,87	1.019.672,17	1.145.138,04	1.276.406,55	1.399.257,31
a. Pemerintahan Umum	515.972,90	567.720,34	629.873,77	687.561,06	728.400,82
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	515.972,90	567.720,34	629.873,77	687.561,06	728.400,82
2. Jasa Pemerintah lainnya					
b. Swasta	387.608,97	451.951,83	515.264,27	588.845,48	670.856,49
1. Sosial Kemasyarakatan	139.022,29	154.292,83	170.829,42	194.992,53	219.983,63
2. Hiburan & Rekreasi	19.390,56	22.559,27	25.266,35	28.580,11	32.993,31
3. Perorangan & Rumahtangga	229.196,11	275.099,73	319.168,50	365.272,85	417.879,55
PDRB DENGAN MIGAS	6.432.277,70	7.449.685,32	8.404.945,13	9.486.200,08	10.692.392,15
PDRB TANPA MIGAS	6.432.277,70	7.449.685,32	8.404.945,13	9.486.200,08	10.692.392,15

Keterangan : *) Angka diperbaiki
**) Angka sementara

Tabel 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN PONOROGO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009 - 2013 (JUTA RUPIAH)

SEKTOR/SUB SEKTOR	2009	2010	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN	1.137.560,47	1.174.625,55	1.193.914,57	1.231.941,59	1.236.700,93
a. Tanaman Bahan Makanan	916.426,18	940.414,64	942.292,45	967.388,93	964.029,72
b. Tanaman Perkebunan	97.333,30	104.535,97	112.255,05	117.999,70	119.151,67
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	116.750,91	122.354,95	131.502,84	138.403,63	145.054,49
d. Kehutanan	1.260,11	1.304,21	1.374,83	1.452,43	1.557,49
e. Perikanan	5.789,98	6.015,78	6.489,40	6.696,90	6.907,56
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	71.236,45	74.228,39	77.532,95	79.396,43	82.474,80
a. Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Pertambangan tanpa Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Penggalian	71.236,45	74.228,39	77.532,95	79.396,43	82.474,80
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	143.718,15	151.929,44	160.532,22	170.137,42	179.906,55
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gas Alam Cair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Tanpa Migas	143.718,15	151.929,44	160.532,22	170.137,42	179.906,55
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	67.106,57	69.722,97	73.805,54	78.679,68	83.938,66
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	16.461,53	17.942,87	19.168,95	20.340,65	21.214,31
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	11.874,80	13.137,05	13.855,42	14.555,01	15.470,92
4. Kertas dan Barang Cetak	16.044,81	17.007,31	18.015,08	19.102,49	20.074,46
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	15.123,92	15.728,70	15.819,02	16.224,07	16.681,04
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	11.155,54	12.047,85	12.973,93	13.776,11	14.614,00
7. Logam Dasar Besi & Baja	38,53	42,38	45,72	46,63	48,59
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	601,86	644,59	684,01	727,21	755,27
9. Barang lainnya	5.310,59	5.655,71	6.164,56	6.685,56	7.109,31
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	52.865,95	56.079,61	59.215,40	62.590,90	66.235,70
a. Listrik	48.340,52	51.382,66	54.330,94	57.730,51	61.462,52
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	4.525,42	4.696,95	4.884,45	4.860,39	4.773,18
5. BANGUNAN	66.890,91	70.569,91	77.856,46	84.758,73	92.136,12
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	847.725,50	920.381,59	1.019.089,52	1.122.704,83	1.237.257,15
a. Perdagangan Besar & Eceran	719.736,31	780.952,06	865.785,43	955.224,80	1.053.309,80
b. Hotel	1.573,67	1.636,61	1.812,60	1.991,26	2.181,67
c. Restoran	126.415,52	137.792,92	151.491,49	165.488,77	181.765,68
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	160.771,06	176.337,36	195.239,05	213.856,68	233.666,78
a. Pengangkutan	100.931,28	108.890,70	119.677,18	129.511,09	139.931,40
1. Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Angkutan Jalan Raya	94.874,68	102.464,66	112.660,21	121.831,44	131.656,55
3. Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Jasa Penunjang Angkutan	6.056,59	6.426,05	7.016,97	7.679,65	8.274,85
b. Komunikasi	59.839,78	67.446,66	75.561,87	84.345,59	93.735,38
1. Pos dan Telekomunikasi	57.572,80	65.057,27	72.953,01	81.519,42	90.706,57
2. Jasa Penunjang Komunikasi	2.266,97	2.389,39	2.608,86	2.826,17	3.028,81
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	223.139,66	239.007,96	260.509,18	282.482,40	306.211,19
a. Bank	46.449,14	49.003,85	53.250,04	57.266,91	62.884,37
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	39.851,27	42.082,94	45.974,48	50.426,84	54.925,05
c. Jasa Penunjang Keuangan	1.070,01	1.173,81	1.217,68	1.295,89	1.329,58
d. Sewa Bangunan	88.499,15	96.641,07	106.954,32	117.159,07	127.789,32
e. Jasa Perusahaan	47.270,09	50.106,29	53.112,66	56.333,69	59.282,88
9. JASA-JASA	445.073,56	467.898,60	493.978,76	520.548,47	547.590,81
a. Pemerintahan Umum	255.154,24	263.574,33	273.284,66	281.997,81	288.654,51
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	255.154,24	263.574,33	273.284,66	281.997,81	288.654,51
2. Jasa Pemerintah lainnya					
b. Swasta	189.919,32	204.324,27	220.694,10	238.550,66	258.936,31
1. Sosial Kemasyarakatan	76.147,39	80.411,64	85.509,36	91.633,16	99.135,99
2. Hiburan & Rekreasi	10.974,96	11.863,93	12.776,29	13.825,33	15.119,64
3. Perorangan & Rumah tangga	102.796,97	112.048,69	122.408,45	133.092,17	144.680,68
PDRB DENGAN MIGAS	3.148.981,71	3.331.058,41	3.537.868,11	3.768.417,45	3.982.180,05
PDRB TANPA MIGAS	3.148.981,71	3.331.058,41	3.537.868,11	3.768.417,45	3.982.180,05

Keterangan : *) Angka diperbaiki
**) Angka sementara

**Tabel 3. PERANAN EKONOMI SEKTORAL PDRB KABUPATEN PONOROGO ATAS DASAR
HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009 - 2013 (%)**

SEKTOR/SUB SEKTOR	2009	2010	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN	39,88	35,73	34,55	33,89	32,48
a. Tanaman Bahan Makanan	32,63	28,79	27,45	26,78	25,50
b. Tanaman Perkebunan	3,04	3,01	3,10	3,11	2,98
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	3,97	3,73	3,79	3,80	3,80
d. Kehutanan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
e. Perikanan	0,21	0,16	0,17	0,17	0,16
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	2,57	1,91	1,91	1,86	1,81
a. Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Pertambangan tanpa Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Penggalian	2,57	1,91	1,91	1,86	1,81
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	3,47	5,02	4,96	4,92	4,88
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gas Alam Cair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Tanpa Migas	3,47	5,02	4,96	4,92	4,88
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	1,59	2,44	2,43	2,42	2,44
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	0,40	0,59	0,59	0,59	0,57
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	0,27	0,44	0,42	0,41	0,40
4. Kertas dan Barang Cetak	0,38	0,54	0,53	0,53	0,52
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	0,44	0,46	0,42	0,40	0,39
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	0,26	0,38	0,40	0,39	0,39
7. Logam Dasar Besi & Baja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
9. Barang lainnya	0,12	0,16	0,16	0,16	0,15
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0,79	1,38	1,32	1,25	1,22
a. Listrik	0,73	1,22	1,17	1,11	1,09
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	0,06	0,16	0,15	0,14	0,12
5. BANGUNAN	1,86	2,09	2,21	2,29	2,39
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	25,86	27,71	28,68	29,42	30,95
a. Perdagangan Besar & Eceran	21,63	22,94	23,76	24,41	25,70
b. Hotel	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
c. Restoran	4,18	4,72	4,87	4,96	5,20
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	4,09	5,23	5,37	5,40	5,51
a. Pengangkutan	2,72	3,58	3,64	3,64	3,65
1. Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Angkutan Jalan Raya	2,54	3,40	3,47	3,46	3,47
3. Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Jasa Penunjang Angkutan	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18
b. Komunikasi	1,38	1,66	1,73	1,77	1,86
1. Pos dan Telekomunikasi	1,32	1,60	1,67	1,71	1,80
2. Jasa Penunjang Komunikasi	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	6,60	7,24	7,38	7,51	7,67
a. Bank	1,34	1,40	1,44	1,47	1,56
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	1,25	1,26	1,29	1,33	1,36
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
d. Sewa Bangunan	2,51	3,18	3,28	3,36	3,43
e. Jasa Perusahaan	1,47	1,38	1,35	1,32	1,30
9. JASA-JASA	14,87	13,69	13,62	13,46	13,09
a. Pemerintahan Umum	8,87	7,62	7,49	7,25	6,81
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	8,87	7,62	7,49	7,25	6,81
2. Jasa Pemerintah lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Swasta	6,00	6,07	6,13	6,21	6,27
1. Sosial Kemasyarakatan	2,33	2,07	2,03	2,06	2,06
2. Hiburan & Rekreasi	0,35	0,30	0,30	0,30	0,31
3. Perorangan & Rumahtangga	3,32	3,69	3,80	3,85	3,91
PDRB DENGAN MIGAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB TANPA MIGAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : *) Angka diperbaiki
**) Angka sementara

Tabel 4. PERANAN EKONOMI SEKTORAL PDRB KABUPATEN PONOROGO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2009 - 2013 (%)

SEKTOR/SUB SEKTOR	2009	2010	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN	39,88	35,26	33,75	32,69	31,06
a. Tanaman Bahan Makanan	32,63	28,23	26,63	25,67	24,21
b. Tanaman Perkebunan	3,04	3,14	3,17	3,13	2,99
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	3,97	3,67	3,72	3,67	3,64
d. Kehutanan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
e. Perikanan	0,21	0,18	0,18	0,18	0,17
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	2,57	2,23	2,19	2,11	2,07
a. Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Pertambangan tanpa Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Penggalian	2,57	2,23	2,19	2,11	2,07
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	3,47	4,56	4,54	4,51	4,52
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gas Alam Cair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Tanpa Migas	3,47	4,56	4,54	4,51	4,52
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	1,59	2,09	2,09	2,09	2,11
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	0,40	0,54	0,54	0,54	0,53
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	0,27	0,39	0,39	0,39	0,39
4. Kertas dan Barang Cetak	0,38	0,51	0,51	0,51	0,50
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	0,44	0,47	0,45	0,43	0,42
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	0,26	0,36	0,37	0,37	0,37
7. Logam Dasar Besi & Baja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
9. Barang lainnya	0,12	0,17	0,17	0,18	0,18
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0,79	1,68	1,67	1,66	1,66
a. Listrik	0,73	1,54	1,54	1,53	1,54
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	0,06	0,14	0,14	0,13	0,12
5. BANGUNAN	1,86	2,12	2,20	2,25	2,31
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	25,86	27,63	28,81	29,79	31,07
a. Perdagangan Besar & Eceran	21,63	23,44	24,47	25,35	26,45
b. Hotel	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
c. Restoran	4,18	4,14	4,28	4,39	4,56
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	4,09	5,29	5,52	5,67	5,87
a. Pengangkutan	2,72	3,27	3,38	3,44	3,51
1. Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Angkutan Jalan Raya	2,54	3,08	3,18	3,23	3,31
3. Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Jasa Penunjang Angkutan	0,17	0,19	0,20	0,20	0,21
b. Komunikasi	1,38	2,02	2,14	2,24	2,35
1. Pos dan Telekomunikasi	1,32	1,95	2,06	2,16	2,28
2. Jasa Penunjang Komunikasi	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	6,60	7,18	7,36	7,50	7,69
a. Bank	1,34	1,47	1,51	1,52	1,58
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	1,25	1,26	1,30	1,34	1,38
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
d. Sewa Bangunan	2,51	2,90	3,02	3,11	3,21
e. Jasa Perusahaan	1,47	1,50	1,50	1,49	1,49
9. JASA-JASA	14,87	14,05	13,96	13,81	13,75
a. Pemerintahan Umum	8,87	7,91	7,72	7,48	7,25
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	8,87	7,91	7,72	7,48	7,25
2. Jasa Pemerintah lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Swasta	6,00	6,13	6,24	6,33	6,50
1. Sosial Kemasyarakatan	2,33	2,41	2,42	2,43	2,49
2. Hiburan & Rekreasi	0,35	0,36	0,36	0,37	0,38
3. Perorangan & Rumah tangga	3,32	3,36	3,46	3,53	3,63
PDRB DENGAN MIGAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PDRB TANPA MIGAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : *) Angka diperbaiki

**) Angka sementara

**Tabel 5. INDEKS PERKEMBANGAN SEKTORAL PDRB KABUPATEN PONOROGO
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2009 - 2013**

SEKTOR/SUB SEKTOR	2009	2010	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN	270,02	308,29	336,27	372,36	402,26
a. Tanaman Bahan Makanan	266,75	303,54	326,49	359,53	385,94
b. Tanaman Perkebunan	289,66	341,53	396,72	449,30	484,88
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	282,56	323,30	371,13	419,35	473,07
d. Kehutanan	289,65	327,53	374,56	437,95	501,38
e. Perikanan	253,16	276,57	315,63	353,63	387,82
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	232,53	254,90	287,86	315,70	347,56
a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	232,53	254,90	287,86	315,70	347,56
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	418,07	497,14	554,77	620,93	694,65
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	418,07	497,14	554,77	620,93	694,65
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	445,34	526,86	593,02	665,69	757,74
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	410,67	506,87	573,90	648,55	712,52
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	439,60	564,23	611,14	665,16	733,87
4. Kertas dan Barang Cetak	420,56	485,94	540,35	611,94	680,36
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	318,58	354,43	366,20	400,19	432,93
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	416,30	511,74	593,64	663,15	738,32
7. Logam Dasar Besi & Baja	367,01	395,20	428,96	448,25	478,06
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	385,62	452,68	496,25	559,61	593,38
9. Barang lainnya	399,16	456,12	522,17	595,58	639,03
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	546,35	602,90	647,47	694,97	761,12
a. Listrik	530,86	578,91	623,50	672,68	742,82
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	724,81	879,35	923,66	951,86	971,88
5. BANGUNAN	348,10	386,45	461,24	538,82	633,05
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	314,47	368,62	430,42	498,38	590,97
a. Perdagangan Besar & Eceran	314,94	364,97	426,40	494,36	586,71
b. Hotel	280,52	305,43	353,74	403,84	472,54
c. Restoran	312,47	388,23	452,16	520,32	614,43
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	359,88	440,02	509,65	578,34	664,80
a. Pengangkutan	374,03	453,17	520,72	586,61	664,14
1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	378,42	460,27	528,99	595,23	673,69
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	309,36	348,69	399,02	459,68	523,55
b. Komunikasi	331,97	414,07	487,82	562,04	666,10
1. Pos dan Telekomunikasi	332,18	416,34	491,47	567,04	673,11
2. Jasa Penunjang Komunikasi	328,07	362,31	404,15	446,85	504,49
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	307,85	377,65	434,30	498,94	574,25
a. Bank	308,23	359,14	416,43	482,22	575,00
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	292,35	346,75	400,03	466,63	536,05
c. Jasa Penunjang Keuangan	239,78	319,47	357,86	405,19	437,06
d. Sewa Bangunan	334,14	435,25	506,51	585,76	674,30
e. Jasa Perusahaan	277,19	323,45	357,74	395,02	437,71
9. JASA-JASA	280,69	316,75	355,72	396,50	434,66
a. Pemerintahan Umum	268,68	295,63	327,99	358,03	379,30
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	268,68	295,63	327,99	358,03	379,30
2. Jasa Pemerintah lainnya	-	-	-	-	-
b. Swasta	298,44	347,98	396,72	453,38	516,52
1. Sosial Kemasyarakatan	275,39	305,64	338,40	386,26	435,77
2. Hiburan & Rekreasi	254,89	296,55	332,13	375,69	433,71
3. Perorangan & Rumahtangga	319,26	383,20	444,58	508,81	582,08
PDRB DENGAN MIGAS	297,09	344,08	388,20	438,14	493,85
PDRB TANPA MIGAS	297,09	344,08	388,20	438,14	493,85

Keterangan : *) Angka diperbaiki
**) Angka sementara

**Tabel 6. INDEKS PERKEMBANGAN SEKTORAL PDRB KABUPATEN PONOROGO
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2009 - 2013**

SEKTOR/SUB SEKTOR	2009	2010	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN	131,74	136,03	138,27	142,67	143,22
a. Tanaman Bahan Makanan	129,71	133,10	133,37	136,92	136,44
b. Tanaman Perkebunan	148,09	159,05	170,80	179,54	181,29
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	135,87	142,39	153,04	161,07	168,81
d. Kehutanan	148,97	154,19	162,54	171,71	184,13
e. Perikanan	130,38	135,47	146,13	150,80	155,55
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	127,79	133,16	139,09	142,43	147,95
a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	127,79	133,16	139,09	142,43	147,95
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	191,16	202,08	213,53	226,30	239,30
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	191,16	202,08	213,53	226,30	239,30
1. Tekanan, Minuman dan Tembakau	194,70	202,29	214,14	228,28	243,54
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	190,89	208,07	222,29	235,88	246,01
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	204,94	226,73	239,12	251,20	267,01
4. Kertas dan Barang Cetak	194,68	206,36	218,59	231,78	243,58
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	158,12	164,44	165,39	169,62	174,40
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	199,47	215,43	231,98	246,33	261,31
7. Logam Dasar Besi & Baja	171,09	188,19	203,00	207,08	215,75
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	193,46	207,19	219,86	233,75	242,77
9. Barang lainnya	207,06	220,52	240,36	260,68	277,20
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	309,57	328,39	346,76	366,52	387,87
a. Listrik	307,64	327,00	345,76	367,40	391,15
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	331,86	344,43	358,18	356,42	350,02
5. BANGUNAN	166,02	175,15	193,23	210,36	228,67
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	151,39	164,37	182,00	200,50	220,96
a. Perdagangan Besar & Eceran	153,68	166,75	184,87	203,96	224,91
b. Hotel	142,09	147,77	163,66	179,79	196,98
c. Restoran	139,67	152,24	167,38	182,84	200,82
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	181,40	198,97	220,29	241,30	263,65
a. Pengangkutan	171,61	185,15	203,49	220,21	237,92
1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	172,28	186,06	204,57	221,22	239,07
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	161,85	171,72	187,51	205,22	221,13
b. Komunikasi	200,71	226,23	253,45	282,91	314,40
1. Pos dan Telekomunikasi	201,39	227,57	255,19	285,16	317,30
2. Jasa Penunjang Komunikasi	185,43	195,44	213,39	231,17	247,74
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	156,19	167,30	182,35	197,73	214,34
a. Bank	160,28	169,09	183,74	197,60	216,99
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	147,39	155,64	170,04	186,50	203,14
c. Jasa Penunjang Keuangan	148,38	162,77	168,85	179,70	184,37
d. Sewa Bangunan	162,70	177,67	196,63	215,39	234,93
e. Jasa Perusahaan	149,00	157,94	167,41	177,57	186,86
9. JASA-JASA	138,26	145,35	153,45	161,70	170,10
a. Pemerintahan Umum	132,87	137,25	142,31	146,84	150,31
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	132,87	137,25	142,31	146,84	150,31
2. Jasa Pemerintah lainnya	-	-	-	-	-
b. Swasta	146,23	157,32	169,92	183,67	199,37
1. Sosial Kemasyarakatan	150,84	159,29	169,39	181,52	196,38
2. Hiburan & Rekreasi	144,27	155,95	167,95	181,74	198,75
3. Perorangan & Rumahtangga	143,19	156,08	170,51	185,39	201,53
PDRB DENGAN MIGAS	145,44	153,85	163,40	174,05	183,92
PDRB TANPA MIGAS	145,44	153,85	163,40	174,05	183,92

Keterangan : *) Angka diperbaiki

**) Angka sementara

**Tabel 7. INDEKS BERANTAI SEKTORAL PDRB KABUPATEN PONOROGO
ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2009 - 2013**

SEKTOR/SUB SEKTOR	2009	2010	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN	112,31	114,17	109,08	110,73	108,03
a. Tanaman Bahan Makanan	112,13	113,79	107,56	110,12	107,35
b. Tanaman Perkebunan	113,92	117,91	116,16	113,25	107,92
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	112,58	114,42	114,80	112,99	112,81
d. Kehutanan	112,49	113,08	114,36	116,93	114,48
e. Perikanan	109,09	109,25	114,12	112,04	109,67
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	108,76	109,62	112,93	109,67	110,09
a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	108,76	109,62	112,93	109,67	110,09
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	115,95	118,91	111,59	111,92	111,87
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	115,95	118,91	111,59	111,92	111,87
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	117,59	118,30	112,56	112,25	113,83
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	116,32	123,42	113,22	113,01	109,86
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	119,12	128,35	108,31	108,84	110,33
4. Kertas dan Barang Cetakan	112,55	115,55	111,20	113,25	111,18
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	110,66	111,25	103,32	109,28	108,18
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	116,54	122,93	116,00	111,71	111,34
7. Logam Dasar Besi & Baja	106,49	107,68	108,54	104,50	106,65
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	113,07	117,39	109,62	112,77	106,04
9. Barang lainnya	110,33	114,27	114,48	114,06	107,30
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	109,63	110,35	107,39	107,34	109,52
a. Listrik	108,02	109,05	107,70	107,89	110,43
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	125,44	121,32	105,04	103,05	102,10
5. BANGUNAN	109,07	111,02	119,35	116,82	117,49
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	114,77	117,22	116,77	115,79	118,58
a. Perdagangan Besar & Eceran	114,12	115,89	116,83	115,94	118,68
b. Hotel	109,83	108,88	115,82	114,16	117,01
c. Restoran	118,34	124,25	116,47	115,08	118,09
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	115,33	122,27	115,83	113,48	114,95
a. Pengangkutan	115,86	121,16	114,91	112,65	113,22
1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	116,23	121,63	114,93	112,52	113,18
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	109,55	112,71	114,44	115,20	113,89
b. Komunikasi	114,18	124,73	117,81	115,21	118,52
1. Pos dan Telekomunikasi	114,43	125,34	118,04	115,38	118,71
2. Jasa Penunjang Komunikasi	108,46	110,44	111,55	110,57	112,90
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	117,34	122,67	115,00	114,88	115,09
a. Bank	113,45	116,52	115,95	115,80	119,24
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	115,50	118,61	115,37	116,65	114,88
c. Jasa Penunjang Keuangan	124,76	133,24	112,02	113,23	107,87
d. Sewa Bangunan	122,44	130,26	116,37	115,65	115,12
e. Jasa Perusahaan	113,03	116,69	110,60	110,42	110,81
9. JASA-JASA	110,78	112,85	112,30	111,46	109,62
a. Pemerintahan Umum	110,07	110,03	110,95	109,16	105,94
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	110,07	110,03	110,95	109,16	105,94
2. Jasa Pemerintah lainnya	-	-	-	-	-
b. Swasta	111,74	116,60	114,01	114,28	113,93
1. Sosial Kemasyarakatan	108,71	110,98	110,72	114,14	112,82
2. Hiburan & Rekreasi	111,25	116,34	112,00	113,12	115,44
3. Perorangan & Rumahtangga	113,70	120,03	116,02	114,45	114,40
PDRB DENGAN MIGAS	113,22	115,82	112,82	112,86	112,72
PDRB TANPA MIGAS	113,22	115,82	112,82	112,86	112,72

Keterangan : *) Angka diperbaiki
**) Angka sementara

**Tabel 8. INDEKS BERANTAI SEKTORAL PDRB KABUPATEN PONOROGO
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2009 - 2013**

SEKTOR/SUB SEKTOR	2009	2010	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN	104,68	103,26	101,64	103,19	100,39
a. Tanaman Bahan Makanan	104,44	102,62	100,20	102,66	99,65
b. Tanaman Perkebunan	107,55	107,40	107,38	105,12	100,98
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	104,29	104,80	107,48	105,25	104,81
d. Kehutanan	102,84	103,50	105,41	105,64	107,23
e. Perikanan	104,03	103,90	107,87	103,20	103,15
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	103,95	104,20	104,45	102,40	103,88
a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	103,95	104,20	104,45	102,40	103,88
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	105,18	105,71	105,66	105,98	105,74
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	105,18	105,71	105,66	105,98	105,74
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	103,60	103,90	105,86	106,60	106,68
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	108,08	109,00	106,83	106,11	104,30
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	109,65	110,63	105,47	105,05	106,29
4. Kertas dan Barang Cetak	105,65	106,00	105,93	106,04	105,09
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	103,71	104,00	100,57	102,56	102,82
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	107,19	108,00	107,69	106,18	106,08
7. Logam Dasar Besi & Baja	106,11	109,99	107,87	102,01	104,19
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	106,64	107,10	106,12	106,32	103,86
9. Barang lainnya	105,71	106,50	109,00	108,45	106,34
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	103,76	106,08	105,59	105,70	105,82
a. Listrik	103,39	106,29	105,74	106,26	106,46
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	107,91	103,79	103,99	99,51	98,21
5. BANGUNAN	105,45	105,50	110,33	108,87	108,70
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	104,65	108,57	110,72	110,17	110,20
a. Perdagangan Besar & Eceran	104,38	108,51	110,86	110,33	110,27
b. Hotel	102,27	104,00	110,75	109,86	109,56
c. Restoran	106,22	109,00	109,94	109,24	109,84
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	109,16	109,68	110,72	109,54	109,26
a. Pengangkutan	107,44	107,89	109,91	108,22	108,05
1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	107,56	108,00	109,95	108,14	108,06
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	105,59	106,10	109,20	109,44	107,75
b. Komunikasi	112,20	112,71	112,03	111,62	111,13
1. Pos dan Telekomunikasi	112,49	113,00	112,14	111,74	111,27
2. Jasa Penunjang Komunikasi	105,28	105,40	109,19	108,33	107,17
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	106,13	107,11	109,00	108,43	108,40
a. Bank	104,58	105,50	108,67	107,54	109,81
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	104,80	105,60	109,25	109,68	108,92
c. Jasa Penunjang Keuangan	108,74	109,70	103,74	106,42	102,60
d. Sewa Bangunan	108,16	109,20	110,67	109,54	109,07
e. Jasa Perusahaan	105,04	106,00	106,00	106,06	105,24
9. JASA-JASA	104,78	105,13	105,57	105,38	105,19
a. Pemerintahan Umum	103,01	103,30	103,68	103,19	102,36
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	103,01	103,30	103,68	103,19	102,36
2. Jasa Pemerintah lainnya	-	-	-	-	-
b. Swasta	107,26	107,58	108,01	108,09	108,55
1. Sosial Kemasyarakatan	105,41	105,60	106,34	107,16	108,19
2. Hiburan & Rekreasi	107,82	108,10	107,69	108,21	109,36
3. Perorangan & Rumahtangga	108,61	109,00	109,25	108,73	108,71
PDRB DENGAN MIGAS	105,01	105,78	106,21	106,52	105,67
PDRB TANPA MIGAS	105,01	105,78	106,21	106,52	105,67

Keterangan : *) Angka diperbaiki

**) Angka sementara

**Tabel 9. INDEKS HARGA IMPLISIT SEKTORAL PDRB KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2009 - 2013**

SEKTOR/SUB SEKTOR (1)	2009 (2)	2010 (3)	2011 (4)	2012 *) (5)	2013 **) (6)
1. PERTANIAN	204,96	226,62	243,20	260,99	280,86
a. Tanaman Bahan Makanan	205,66	228,05	244,80	262,58	282,85
b. Tanaman Perkebunan	195,59	214,73	232,28	250,25	267,46
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	207,96	227,04	242,51	260,35	280,23
d. Kehutanan	194,43	212,43	230,45	255,05	272,30
e. Perikanan	194,17	204,16	215,99	234,49	249,33
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	181,96	191,43	206,97	221,65	234,91
a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	181,96	191,43	206,97	221,65	234,91
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	218,70	246,01	259,81	274,38	290,29
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	218,70	246,01	259,81	274,38	290,29
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	228,73	260,44	276,94	291,61	311,14
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	215,13	243,60	258,17	274,95	289,63
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	214,50	248,86	255,57	264,79	274,85
4. Kertas dan Barang Cetak	216,02	235,48	247,20	264,01	279,32
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	201,48	215,53	221,42	235,93	248,24
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	208,70	237,55	255,90	269,21	282,55
7. Logam Dasar Besi & Baja	214,51	210,00	211,31	216,47	221,58
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	199,33	218,48	225,71	239,40	244,42
9. Barang lainnya	192,77	206,84	217,25	228,48	230,53
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	176,48	183,59	186,72	189,61	196,23
a. Listrik	172,56	177,04	180,33	183,09	189,91
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	218,41	255,30	257,87	267,06	277,66
5. BANGUNAN	209,68	220,64	238,70	256,14	276,84
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	207,72	224,26	236,50	248,56	267,46
a. Perdagangan Besar & Eceran	204,93	218,87	230,65	242,37	260,87
b. Hotel	197,43	206,69	216,14	224,61	239,89
c. Restoran	223,72	255,01	270,14	284,58	305,95
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	198,39	221,15	231,35	239,68	252,15
a. Pengangkutan	217,95	244,76	255,90	266,39	279,14
1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	219,66	247,38	258,58	269,06	281,80
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	191,14	203,05	212,80	223,99	236,76
b. Komunikasi	165,39	183,03	192,48	198,66	211,86
1. Pos dan Telekomunikasi	164,94	182,95	192,59	198,85	212,14
2. Jasa Penunjang Komunikasi	176,93	185,38	189,39	193,30	203,64
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	197,09	225,73	238,16	252,33	267,91
a. Bank	192,31	212,39	226,64	244,03	264,99
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	198,35	222,79	235,26	250,20	263,88
c. Jasa Penunjang Keuangan	161,60	196,27	211,94	225,48	237,06
d. Sewa Bangunan	205,37	244,98	257,60	271,96	287,02
e. Jasa Perusahaan	186,04	204,80	213,69	222,47	234,24
9. JASA-JASA	203,02	217,93	231,82	245,20	255,53
a. Pemerintahan Umum	202,22	215,39	230,48	243,82	252,34
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	202,22	215,39	230,48	243,82	252,34
2. Jasa Pemerintah lainnya	-	-	-	-	-
b. Swasta	204,09	221,19	233,47	246,84	259,08
1. Sosial Kemasyarakatan	182,57	191,88	199,78	212,80	221,90
2. Hiburan & Rekreasi	176,68	190,15	197,76	206,72	218,21
3. Perorangan & Rumah tangga	222,96	245,52	260,74	274,45	288,83
PDRB DENGAN MIGAS	204,27	223,64	237,57	251,73	268,51
PDRB TANPA MIGAS	204,27	223,64	237,57	251,73	268,51

Keterangan : *) Angka diperbaiki
**) Angka sementara

**Tabel 10. PERTUMBUHAN INDEKS IMPLISIT PDRB KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2009 - 2013 (%)**

SEKTOR/SUB SEKTOR	2009	2010	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN	7,29	10,57	7,31	7,31	7,62
a. Tanaman Bahan Makanan	7,37	10,89	7,34	7,26	7,72
b. Tanaman Perkebunan	5,92	9,78	8,17	7,74	6,88
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	7,95	9,18	6,81	7,36	7,64
d. Kehutanan	9,39	9,26	8,48	10,68	6,76
e. Perikanan	4,87	5,15	5,79	8,57	6,33
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	4,63	5,20	8,12	7,10	5,98
a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	4,63	5,20	8,12	7,10	5,98
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	10,23	12,49	5,61	5,61	5,80
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	10,23	12,49	5,61	5,61	5,80
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	13,50	13,87	6,33	5,30	6,70
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	7,62	13,23	5,98	6,50	5,34
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	8,64	16,02	2,70	3,61	3,80
4. Kertas dan Barang Cetak	6,53	9,01	4,98	6,80	5,80
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	6,70	6,97	2,73	6,55	5,22
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	8,73	13,82	7,72	5,20	4,95
7. Logam Dasar Besi & Baja	0,36	-2,10	0,62	2,44	2,36
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	6,03	9,61	3,31	6,07	2,10
9. Barang lainnya	4,37	7,30	5,03	5,17	0,90
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	5,66	4,03	1,71	1,55	3,49
a. Listrik	4,48	2,59	1,86	1,53	3,72
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	16,24	16,89	1,01	3,56	3,97
5. BANGUNAN	3,44	5,23	8,18	7,31	8,08
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	9,68	7,96	5,46	5,10	7,60
a. Perdagangan Besar & Eceran	9,34	6,80	5,38	5,08	7,63
b. Hotel	7,39	4,69	4,57	3,92	6,80
c. Restoran	11,41	13,99	5,93	5,34	7,51
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	5,65	11,48	4,61	3,60	5,20
a. Pengangkutan	7,84	12,30	4,55	4,10	4,79
1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	8,06	12,62	4,53	4,05	4,74
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	3,76	6,23	4,80	5,26	5,70
b. Komunikasi	1,76	10,67	5,16	3,21	6,64
1. Pos dan Telekomunikasi	1,72	10,92	5,27	3,25	6,68
2. Jasa Penunjang Komunikasi	3,02	4,78	2,16	2,06	5,35
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	10,56	14,53	5,51	5,95	6,18
a. Bank	8,48	10,44	6,71	7,67	8,59
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	10,22	12,32	5,60	6,35	5,47
c. Jasa Penunjang Keuangan	14,73	21,46	7,98	6,39	5,13
d. Sewa Bangunan	13,20	19,29	5,15	5,57	5,54
e. Jasa Perusahaan	7,61	10,08	4,34	4,11	5,29
9. JASA-JASA	5,72	7,34	6,38	5,77	4,21
a. Pemerintahan Umum	6,85	6,51	7,01	5,79	3,50
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	6,85	6,51	7,01	5,79	3,50
2. Jasa Pemerintah lainnya	-	-	-	-	-
b. Swasta	4,18	8,38	5,55	5,73	4,96
1. Sosial Kemasyarakatan	3,14	5,10	4,12	6,52	4,28
2. Hiburan & Rekreasi	3,17	7,62	4,00	4,53	5,56
3. Perorangan & Rumahtangga	4,69	10,12	6,20	5,26	5,24
PDRB DENGAN MIGAS	7,81	9,49	6,23	5,96	6,66
PDRB TANPA MIGAS	7,81	9,49	6,23	5,96	6,66

Keterangan : *) Angka diperbaiki
**) Angka sementara

**Tabel 11. PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2009 - 2013 (%)**

SEKTOR/SUB SEKTOR	2009	2010	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PERTANIAN	4,68	3,26	1,64	3,19	0,39
a. Tanaman Bahan Makanan	4,44	2,62	0,20	2,66	-0,35
b. Tanaman Perkebunan	7,55	7,40	7,38	5,12	0,98
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	4,29	4,80	7,48	5,25	4,81
d. Kehutanan	2,84	3,50	5,41	5,64	7,23
e. Perikanan	4,03	3,90	7,87	3,20	3,15
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	3,95	4,20	4,45	2,40	3,88
a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-	-
b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-	-
c. Penggalian	3,95	4,20	4,45	2,40	3,88
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	5,18	5,71	5,66	5,98	5,74
a. Industri Migas	-	-	-	-	-
1. Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-	-
2. Gas Alam Cair	-	-	-	-	-
b. Industri Tanpa Migas	5,18	5,71	5,66	5,98	5,74
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	3,60	3,90	5,86	6,60	6,68
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	8,08	9,00	6,83	6,11	4,30
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	9,65	10,63	5,47	5,05	6,29
4. Kertas dan Barang Cetak	5,65	6,00	5,93	6,04	5,09
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	3,71	4,00	0,57	2,56	2,82
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	7,19	8,00	7,69	6,18	6,08
7. Logam Dasar Besi & Baja	6,11	9,99	7,87	2,01	4,19
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	6,64	7,10	6,12	6,32	3,86
9. Barang lainnya	5,71	6,50	9,00	8,45	6,34
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	3,76	6,08	5,59	5,70	5,82
a. Listrik	3,39	6,29	5,74	6,26	6,46
b. Gas	-	-	-	-	-
c. Air Bersih	7,91	3,79	3,99	-0,49	-1,79
5. BANGUNAN	5,45	5,50	10,33	8,87	8,70
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	4,65	8,57	10,72	10,17	10,20
a. Perdagangan Besar & Eceran	4,38	8,51	10,86	10,33	10,27
b. Hotel	2,27	4,00	10,75	9,86	9,56
c. Restoran	6,22	9,00	9,94	9,24	9,84
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	9,16	9,68	10,72	9,54	9,26
a. Pengangkutan	7,44	7,89	9,91	8,22	8,05
1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2. Angkutan Jalan Raya	7,56	8,00	9,95	8,14	8,06
3. Angkutan Laut	-	-	-	-	-
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	-	-	-	-	-
5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6. Jasa Penunjang Angkutan	5,59	6,10	9,20	9,44	7,75
b. Komunikasi	12,20	12,71	12,03	11,62	11,13
1. Pos dan Telekomunikasi	12,49	13,00	12,14	11,74	11,27
2. Jasa Penunjang Komunikasi	5,28	5,40	9,19	8,33	7,17
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	6,13	7,11	9,00	8,43	8,40
a. Bank	4,58	5,50	8,67	7,54	9,81
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	4,80	5,60	9,25	9,68	8,92
c. Jasa Penunjang Keuangan	8,74	9,70	3,74	6,42	2,60
d. Sewa Bangunan	8,16	9,20	10,67	9,54	9,07
e. Jasa Perusahaan	5,04	6,00	6,00	6,06	5,24
9. JASA-JASA	4,78	5,13	5,57	5,38	5,19
a. Pemerintahan Umum	3,01	3,30	3,68	3,19	2,36
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	3,01	3,30	3,68	3,19	2,36
2. Jasa Pemerintah lainnya	-	-	-	-	-
b. Swasta	7,26	7,58	8,01	8,09	8,55
1. Sosial Kemasyarakatan	5,41	5,60	6,34	7,16	8,19
2. Hiburan & Rekreasi	7,82	8,10	7,69	8,21	9,36
3. Perorangan & Rumahtangga	8,61	9,00	9,25	8,73	8,71
PDRB DENGAN MIGAS	5,01	5,78	6,21	6,52	5,67
PDRB TANPA MIGAS	5,01	5,78	6,21	6,52	5,67

Keterangan : *) Angka diperbaiki
**) Angka sementara

Tabel P.12
SUSUNAN AGREGAT PDRB DAN PENDAPATAN REGIONAL KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2009 - 2013
(000.000 Rp.)

RINCIAN	2009	2010	2011	2012 *)	2013 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (JUTA RUPIAH)	6.432.277,70	7.449.685,32	8.404.945,13	9.486.200,08	10.692.392,15
2. PENYUSUTAN (JUTA RUPIAH)	334.478,44	387.383,64	437.057,15	493.282,40	556.004,39
3. PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETO ATAS DASAR HARGA PASAR (JUTA RUPIAH)	6.097.799,26	7.062.301,68	7.967.887,98	8.992.917,68	10.136.387,76
4. PAJAK TIDAK LANGSUNG (JUTA RUPIAH)	90.064,50	104.310,20	117.685,71	132.825,39	149.714,45
5. PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETO ATAS DASAR FAKTOR PRODUKSI (JUTA RUPIAH)	6.007.734,77	6.957.991,48	7.850.202,27	8.860.092,28	9.986.673,31
6. JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN (JIWA *)	854.505,00	856.700,00	859.300,00	861.800,00	863.900,00
7. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PER KAPITA (RUPIAH)	7.527.489,84	8.695.792,36	9.781.153,41	11.007.426,41	12.376.886,39
8. PENDAPATAN REGIONAL PERKAPITA (RUPIAH)	7.030.660,76	8.121.853,02	9.135.578,11	10.280.914,69	11.559.987,63
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000					
1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (JUTA RUPIAH)	3.148.981,71	3.331.058,41	3.537.868,11	3.768.417,45	3.982.180,05
2. PENYUSUTAN (JUTA RUPIAH)	163.747,05	173.215,04	183.969,14	195.957,71	207.073,36
3. PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETO ATAS DASAR HARGA PASAR (JUTA RUPIAH)	2.985.234,67	3.157.843,37	3.353.898,97	3.572.459,75	3.775.106,69
4. PAJAK TIDAK LANGSUNG (JUTA RUPIAH)	44.091,92	46.641,35	49.537,09	52.765,23	55.758,33
5. PRODUK DOMESTIK REGIONAL NETO ATAS DASAR FAKTOR PRODUKSI (JUTA RUPIAH)	2.941.142,75	3.111.202,03	3.304.361,88	3.519.694,52	3.719.348,36
6. JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN (JIWA *)	854.505,00	856.700,00	859.300,00	861.800,00	863.900,00
7. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PER KAPITA (RUPIAH)	3.685.153,06	3.888.243,74	4.117.151,29	4.372.728,54	4.609.538,20
8. PENDAPATAN REGIONAL PERKAPITA (RUPIAH)	3.441.925,73	3.631.612,03	3.845.411,24	4.084.119,88	4.305.299,64

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo

*) Angka diperbaiki

**) Angka Sementara

D A T A

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo
Jl. Letjend. Suprpto No. 14 Ponorogo
Telp/Fax : 0352-481026
E-mail : bps3502@mailhost.bps.go.id